

Suharjuddin, S.Pd, M.Pd

KESETARAAN GENDER

DAN STRATEGI PENGARUSUTAMAANNYA



KESETARAAN GENDER DAN STRATEGI PENGARUSUTAMAANNYA

Dr (cand) Suharjuddin, S.Pd, M.Pd.



pena persada
PENERBIT CV. PENA PERSADA

**KESETARAAN GENDER DAN
STRATEGI PENGARUSUTAMAANNYA**

Penulis :

Dr (cand) Suharjuddin, S.Pd, M.Pd.

Editor :

Novrian, S.Sos, M.IKom

ISBN : 978-623-6837-04-7

Cover Design:

Retnani Nur Brilliant

Layout :

Nisa Falahia

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi :

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah

Email : penerbit.penapersada@gmail.com

Website : penapersada.com

Phone : (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved

Cetakan pertama : 2020

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin penerbit.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil Alamin.....

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala nikmat, karunia dan HidayahNya. Dialah sumber segala ilmu yang memberikan kemudahan kepada penulis dalam memahami konsep, teori, dan mengilhami untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan kesetaraan gender.

Buku ini dengan ilham dari Allah SWT, Tuhan semesta alam diberi judul Kesetaraan gender Dan Strategi Pengarusutamaannya. Buku ini berawal dari kegelisahan penulis terhadap fenomena mispersepsi dan miskonsepsi terhadap gender yang terjadi di sekitar penulis. Fakta bahwa gender sering kali dipahami dengan sudut pandang yang sempit dan tidak jarang berujung pada penolakan konsep gender. Pembangunan masyarakat yang bermartabat hendaknya menghindarkan netral Gender dan bias gender. Pengarusutamaan gender hendaknya menjadi bagian yang integratif dalam konsep pembangunan.

Buku ini penulis persembahkan bagi penggiat dan pejuang kesetaraan gender & HAM, para politisi dan birokrat yang masih mau mengedepankan kepentingan terbaik masyarakat dalam pembangunan, akademisi dan masyarakat luas yang memiliki ketertarikan dalam hal kesetaraan gender. Usaha dan kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas dalam menyelesaikan buku ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan mensosialisasikan kepada khalayak luas untuk memahami dan menerima kesetaraan gender dengan konsep yang benar. Buku ini disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat yang membacanya.

Penulis mengakui tiada gading yang tak retak. Keterbatasan, kelemahan dan kekurangan dalam buku ini merupakan suatu keniscayaan. Namun dengan ketulusan hati dan tanpa memberikan pretensi negatif, penulis akan memberikan konstruksi gender dalam perspektif kesetaraan dan pola-pola pengarus utamaannya dalam pembangunan. Diharapkan dimasa yang akan datang, gender dapat dipahami secara komprehensif dan pengarusutamaan gender menjadi salah satu landasan dalam

perencanaan pembangunan demi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

Secara khusus saya persembahkan buku ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Prof. Dr. Hasanuddin Bua, SE, M.Si dan Ibunda Suraidah, Se, MM yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan, motivasi kepada penulis. Teladan dan idolaku
2. Kepada keluarga kecilku, Hj. Pratiwi Zuliatika my heaven angel. Ketiga buah hati tersayangku Naura Putri Khalizah, Muh. Fatih Putra Al-Haq dan Auliya Putri Ramadhani yang selalu menjadi pelipur laraku
3. Kepada rekan kerja, kolega, tempat-teman pejuang perlindungan perempuan dan anak yang tidak bias saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi kontribusi mereka dalam buku ini.

Semoga buku ini bias bermanfaat bagi para pembaca dan bias diaplikasikan dalam setiap proses pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan gender melalui pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Salah takzim

Dr (cand) Suharjuddin, S.Pd, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Tingkat keberhasilan pembangunan yang mengakomodir persoalan gender dapat diukur. Salah satunya *tool* yang dapat digunakan adalah IPG (Indeks Pembangunan Gender). IPG diperkenalkan oleh *United Nation Development Program* (UNDP) dalam laporan pembangunan manusia pada tahun 1995. Diharapkan dari angka IPG ini mampu berfungsi sebagai penjelasan yang lebih komprehensif mengenai program-program pembangunan yang mengakomodir kesetaraan dan keadilan gender. Salah satu isu klasik yang sering menjadi perbincangan dalam pembangunan adalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam pembangunan baik secara nasional maupun lokal. Kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan yang bias gender justru akan melahirkan marjinalisasi pada kelompok tertentu dimasyarakat. Salah satunya adalah masalah pembangunan yang tidak berperspektif gender dapat berdampak munculnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.

Sudut pandang realitas gender yang diangkat dalam buku ini bersifat komprehensif. Gender dilihat dari berbagai sudut pandang diantaranya dalam bidang sosial kemasyarakatan, industri, perdagangan, jasa, pertanian, peternakan, dan ketenaga kerjaan, pendidikan serta kesehatan yang disajikan dalam bentuk data terpilah yang kemudian di analisis dari perspektif gender terhadap hasil data yang terkumpul.

Penyusunan buku ini terilhami dari perjalanan panjang penulis sebagai konsultan dan narasumber dalam berbagai forum terkait dengan Gender. Dimana penulis menemukan realitas bahwa konsep Gender masih diinterpretasikan secara bias bahkan masih ditemukan mispersepsi mengenai Gender. Fenomena Gender di Kabupaten Bekasi penulis jadikan sebagai objek didasarkan pada dua hal. Pertama, intensitas dan interaksi penulis di Kab. Bekasi cukup tinggi, sehingga realitas kehidupan masyarakat Bekasi utamanya terkait dengan Gender sangat membekas dan melekat pada diri penulis. Kedua, Kabupaten Bekasi sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota DKI Jakarta memiliki dinamika Gender yang kompleks. Sebagai kawasan

industri terbesar di Asia Tenggara, Kab. Bekasi menyediakan peluang yang sangat terbuka untuk pelibatan perempuan dalam sejumlah sektor.

Buku ini mengintegrasikan konsep MDG's yang di aplikasikan sejak tahun 2000 hingga 2015 dan konsep SDG's untuk periode 2015-2030. SDG's (*Sustainable Development Goals*) diratifikasi oleh Indonesia menjadi komponen pembangunan nasional. Untuk memberikan khasanah yang lebih luas, buku ini memotret data kekerasan terhadap pada perempuan dan anak. Tambahan tersebut merupakan bentuk kesadaran bersama bahwa data kekerasan baik itu pada perempuan dan anak perlu untuk disampaikan agar menjadi proses penyadaran kepada semua pemangku kepentingan mengenai realitas yang ada di masyarakat. Namun demikian penulis merasakan masih banyak kekurangan data yang sulit dijadikan patokan obyektif namun mampu menjelaskan proyeksi yang ada untuk penilaian ke depan berkaitan upaya mengurangi kesenjangan antar gender.

Buku ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi dan sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat mengenai kesetaraan gender dan strategi pengarusutamaannya dalam masyarakat. Selain itu juga, buku ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah, utamanya Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam membuat rumusan pembangunan yang berkonsep pengarusutamaan gender. Diharapkan nantinya juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah di tingkat provinsi maupun pusat.

Penulis juga memohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penulisan buku ini, baik dalam bentuk penyajian maupun isinya, sehingga kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan untuk pembuatan buku selanjutnya.

Bekasi, Agustus 2020

Penulis

BERANDA

Pembangunan nasional yang menjadi prioritas kerja pemerintah pusat dan daerah telah menghasilkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Kemajuan pembangunan tentunya tidak dapat dihindarkan dari berbagai tantangan yang semakin beragam dan kompleks. Dengan memperhatikan demikian cepatnya pengaruh globalisasi yang mendorong lahirnya perubahan sosial di masyarakat, dibuktikan dengan semakin tingginya diferensiasi kebutuhan masyarakat dan berubahnya pola pikir masyarakat serta pola perilaku masyarakat dengan segala konsekuensi yang ditimbulkan. Hendaknya hal tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam upaya proses pembangunan yang integrative dan komprehensif.

Tantangan serta peluang yang muncul sebagai konsekuensinya harus diakomodir dengan membuat perencanaan di masa mendatang serta proyeksi yang diharapkan dapat dijadikan panduan dalam menyusun program-program kegiatan di berbagai bidang pemerintahan. Isu yang selalu hangat serta menarik untuk didiskusikan tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga pada tingkat nasional dan internasional adalah persoalan gender, perlindungan perempuan & anak serta pembangunan. Salah satu persoalan itu adalah adanya pembangunan yang tidak tepat sasaran dan ketidaksetaraan dalam menempatkan peran dan fungsi laki-laki dan perempuan di dalam program-program pembangunan dan kurangnya pengakomodasian atas pengarusutamaan hak-hak anak.

Semakin pesatnya program-program pembangunan berbasis industri, bisnis perdagangan dan jasa di sisi lain mendorong lahirnya permasalahan baru, seperti semakin tingginya laju pertumbuhan penduduk, rendahnya pemerataan di bidang ekonomi yang menyebabkan munculnya kemiskinan, tingginya angka pengangguran dan termarginalnya masyarakat/penduduk asli dari proses pembangunan, meningkatnya jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, tergesernya pembangunan pertanian dan peternakan serta perikanan, karena faktor

pertumbuhan ekonomi yang didominasi sektor industri dan perdagangan.

Buku ini membahas dan mengulas masalah ketidaksetaraan dan strategi pengarusutamaan gender di dalam pembangunan serta permasalahan perlindungan perempuan dan anak. Hal ini menjadi penting dibicarakan mengingat upaya pembangunan dan pertumbuhan yang tidak melihat gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai isu, akan berdampak pada tertinggalnya perempuan dalam pembangunan dan lebih jauhnya lagi terjadi marginalisasi terhadap salah satu gender.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut maka salah satu upaya yang digalakkan oleh Pemerintah adalah dilaksanakannya Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pengakomodasian hak-hak perempuan dan anak di dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengevaluasian.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
BERANDA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK & GAMBAR	xiv
I. DINAMIKA PEMBANGUNAN NASIONAL	1
A. Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	3
B. Komitmen Pemerintah	6
II. PEMBANGUNAN BERBASIS GENDER	14
A. Definisi Gender dan Pembangunan	14
B. Analisis Gender	21
1. Teori dan Konsep Gender.....	23
2. Ketimpangan Gender.....	25
3. Statistik Gender dan Data Terpilah	30
III. STRATEGI PENGARUSUTAMAAN GENDER	36
A. Millennium Development Goals (MDG's)	36
B. MDG's Di Indonesia	39
C. Konsep SDG's 2015-2030	45
D. Deskripsi Pemerintah Daerah.....	50
IV. KESETARAAN GENDER; REALITA & IMPLIKASINYA	54
A. Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender	56
B. Pendidikan dalam Statistik Gender.....	60
C. Kesehatan dalam Statistik Gender.....	67
D. Pengelolaan Pertanian & Peternakan dalam Statistik Gender.....	73
E. Program Keluarga Berencana dalam Statistik Gender.....	77
F. PNS/ASN dalam Statistik gender	80
G. Peran dalam Politik Kelembagaan Dalam Statistik Gender.....	84
H. Pengembangan UMKM dalam Statistik Gender	97
I. Isu-Isu Gender Spesifik	101

J. Pencari Kerja dan Lowongan Pekerjaan Berdasarkan Gender.....	107
K. Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.....	109
L. Pegawai Yudikatif, Aparat kepolisian Serta TNI dalam Perspektif Gender	110
M. Pengusaha dan Pegawai di Perusahaan Swasta (Meneger) Serta Pegawai BUMD Berdasarkan Gender	112
N. Perempuan dan Anak Korban Kekerasan & Trafficking	113
DAFTAR PUSTAKA.....	121

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender Di Kabupaten Bekasi	56
Tabel 4.2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Gender Di Kabupaten Bekasi Tahun 2017	57
Tabel 4.3.	Jumlah TK Dan Sederajat Berdasarkan Gender Pada Setiap Kecamatan Di Kabupaten Bekasi	61
Tabel 4.4.	Jumlah Guru SD, SMP, SMA/SMK Dan Sederajat Berdasarkan Gender Pada Setiap Kecamatan Di Kabupaten Bekasi	63
Tabel 4.5.	Jumlah Kepala Sekolah Di Tingkat SD, SMP, SMA Dan SMK Dan Sederajat Pada Setiap Kecamatan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2016	64
Tabel 4.6.	Pegawai UPT Di Puskesmas Berdasarkan Gender Per-Kecamatan Di Kabupaten Bekasi 2016	68
Tabel 4.7.	Jumlah Dokter Puskesmas Berdasarkan Gender Per-Kecamatan di Kabupaten Bekasi tahun 2016	69
Tabel 4.8.	Jumlah Tenaga Perawat Puskesmas Berdasarkan Gender	71
Tabel 4.9.	Jumlah Pengguna Pelayanan Puskesmas Berdagarkan Gender Per Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2016	72
Tabel 4.10.	Jumlah Petani Penggarap Berdasarkan Gender Per Kecamatan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2016	75
Tabel 4.11.	Jumlah Pemilik Lahan Peternakan Berdasarkan Gender Per-Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2016	76
Tabel 4.12.	Jumlah Pegawai UPT PLKB Berdasarkan Gender Per Kecamatan Di Kabupaten	78

	Bekasi Tahun 2017	
Tabel 4.13.	Jumlah Pengguna KB Berdasarkan Gender Per Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2016	79
Tabel 4.14.	Daftar Normatif Pejabat Struktural Berdasarkan Gender Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Periode September 2016	80
Tabel 4.15.	Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Tingkat Kecamatan Di kabupaten Bekasi Tahun 2015/2016	83
Tabel 4.16.	Pengurus Partai Politik Berdasarkan Gender Tahun 2015-2016 di Kabupaten Bekasi	85
Tabel 4.17.	Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan Jenis Kelamin 2014-2019	87
Tabel 4.18.	Perbandingan Anggota BPD Periode 2 di Pemerintah Desa Per Kecamatan berdasarkan gender Di Kabupaten Bekasi Tahun 2016	90
Tabel 4.19.	Jumlah Kepala Desa Berdasarkan Gender	91
Tabel 4.20.	Jumlah Tokoh Masyarakat Berdasarkan Gender Dan Per Kecamatan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2016	93
Tabel 4.21.	Jumlah Sekretaris Desa Berdasarkan Gender Per Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2016	94
Tabel 4.22.	Jumlah Perangkat Desa Berdasarkan Gender Per Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2016	96
Tabel 4.23.	Jumlah Koperasi Dan Pengurus Koperasi Berdasarkan Gender di Kabupaten Bekasi Tahun 2016	98
Tabel 4.24.	Data Jumlah UMKM Dan Kepengurusan Berdasarkan Gender Di Kabupaten Bekasi	99

Tabel 4.25.	Jumlah Industri Makanan Dan Minuman Dan Pengelolaan Berdasarkan Gender di Kabupaten Bekasi Tahun 2016	101
Tabel 4.26.	Jumlah Lowongan tenaga Kerja Dan Pencari Kerja Berdasarkan Gender Tahun 2017.	108
Tabel 4.27.	Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Berdasarkan Gender tahun 2016.	109
Tabel 4.28.	Pegawai Yudikatif (Hakim/Jaksa) dan Aparat Kepolisian Serta TNI Berdasarkan Gender tahun 2017.	111
Tabel 4.29.	Jumlah Pengusaha, Menejer Perusahaan Swasta Dan Pegawai BUMD Dalam Perspektif Gender di Kab. Bekasi Tahun 2016	112
Tabel 4.30	Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Perspektif Gender di Kab. Bekasi Tahun 2016	115
Tabel 4.31.	Jumlah Kasus Pedofilia Dan Jumlah Korban Pedofilia di Kabupaten Bekasi Tahun 2017	118
Tabel 4.32.	Jumlah Anak Pelaku Tindak Pidana Dana Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Gender di Kab. Bekasi Tahun 2017	120

DAFTAR GRAFIK & GAMBAR

Gambar 1.1.	Komponen PUG dalam Inpres No. 9 Tahun 2000	7
Gambar 1.2.	Arah Strategi PPRG dalam PUG	10
Gambar 1.3.	Disain Alur Pikir Pembangunan Responsif Gender	11
Gambar 2.1.	Konsep Gender	15
Gambar 2.2.	Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender	22
Gambar 2.3.	Konsep Gender Vs Konsep Seks	23
Gambar 4.1	Jumlah Penduduk Terpadat Dan Terkecil Ditinjau dari Gender	58
Gambar 4.2	Jumlah Kepala Sekolah di Tingkat SD, SMP, SMA-SMK dan Sederajat dengan Jumlah Rasio Gender Terbesar	66
Gambar 4.3	Presentase Jumlah Perawat Di Puskesmas Ditinjau Dari Gender	70
Gambar 4.4	Jumlah Kepemilikan Lahan Pertanian Berdasarkan Gender Per Kecamatan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2016	74
Gambar 4.5	Usia Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan kelompok Umur di Kab. Bekasi Tahun 2017.	116
Gambar 4.6	Bagan Usia Pelaku Kekerasan Terhadap Anak di Kab.Bekasi Tahun 2017	118

BAB I

DINAMIKA PEMBANGUNAN NASIONAL

Dewasa ini, perhatian dunia terhadap pembangunan yang berbasis gender dan mengakomodir hak-hak perempuan dan anak semakin besar. Telah lama diketahui bahwa hampir di seluruh negara telah terjadi diskriminasi gender. Ketidakadilan gender atau diskriminasi gender merupakan akibat dari adanya sistem (struktur) sosial dimana salah satu jenis kelamin (laki-laki maupun perempuan) menjadi korban. Hal ini terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk dan cara yang menimpa kedua belah pihak, walaupun dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak dialami oleh perempuan (BKKBN, 2016).¹

Tujuan pembangunan pada intinya adalah untuk menciptakan kehidupan yang makmur, adil dan sejahtera dengan cara mensejahterakan manusia sebagai makhluk individu maupun sosial. Artinya, pembangunan harus diterima dan dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan sudah semestinya berfokus pada pembangunan manusia. Pembangunan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya merupakan upaya-upaya untuk mendukung pembangunan manusia tersebut.

Pembangunan manusia merupakan modal utama keberlangsungan suatu Negara. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas SDM Indonesia sebagai manusia pembangunan Indonesia merupakan kebutuhan yang mendesak di era globalisasi, khususnya menyambut perdagangan bebas di kawasan ASEAN 2015, MEA di tahun 2016 (Masyarakat Ekonomi ASEAN), dan di kawasan Asia-Pasifik 2020.

¹ Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2014*, Penerbit Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, CV Permata Andhika: Jakarta 2014.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bila UNDP mengeluarkan suatu standar keberhasilan pembangunan dilihat dari kualitas hidup yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks (HDI)* adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Oleh karena itu, ukuran pembangunan sangat ditentukan oleh beberapa indikator yang dituangkan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain: "IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari Indeks Harapan Hidup, (e0), Indeks Pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan Indeks Standar Hidup Layak"². Namun indikator IPM belum mampu menekan dan menjelaskan secara menyeluruh terkait dengan ketidaksetaraan pembangunan atas dasar gender, hal ini diperkuat dengan hasil analisis dari BPS yang dijabarkan dalam kutipan sebagai berikut:

'Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kualitas hidup menunjukkan perkembangan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Pada tahun 2004, IPM nasional mencapai 68,69 kemudian meningkat menjadi 72,77 pada tahun 2011. Hanya sayangnya, keberhasilan pembangunan kualitas hidup yang diukur melalui IPM masih belum cukup efektif memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai kapabilitas dasar dibidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Fenomena kesenjangan ini secara statistik dapat ditunjukkan oleh pencapaian indeks Pembangunan Gender (IPG) yang nilainya lebih kecil dari pencapaian IPM, baik di level nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota. Meski demikian, perkembangan perkembangan pencapaian IPG dari tahun ketahun terus meningkat, akan tetapi tidak secepat peningkatan IPM."³

² www.jabarprov.go.id/.../PENGHITUNGANINDEKSPEMBANGUNAN ..., diakses 22 September 2016

³ Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2014*"

Fenomena kesenjangan ini secara statistik dapat ditunjukkan oleh pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang nilainya lebih kecil dari pencapaian IPM, baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Meski demikian, perkembangan pencapaian IPG dari tahun-ketahun terus meningkat, akan tetapi tidak secepat peningkatan IPM.

A. Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Disadari, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung pada peran serta seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus pemanfaat hasil pembangunan. Secara tuntutan akan kualitas sumber daya manusia (SDM) perempuan paling tidak memiliki dampak pada dua hal. Pertama, dengan kualitas yang dimiliki, perempuan akan menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. Kedua, perempuan yang berkualitas turut mempengaruhi kualitas generasi penerus, mengingat fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia di masa datang. Tetapi pada kenyataannya, selama ini peran serta kaum perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan masih belum dimanfaatkan secara optimal.

Hal tersebut diperparah dengan semakin meningkatnya angka kekerasan yang dialami kaum perempuan dan anak. Kekerasan yang dialami perempuan dan anak dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis, verbal bahkan kekerasan seksual. Dalam upaya untuk menciptakan pembangunan yang memiliki aspek kesetaraan dan keadilan gender, meningkatnya angka kekerasan pada perempuan dan anak merefleksikan realitas pembangunan komprehensif yang belum berdasarkan pengarusuteraan gender secara optimal.

Berdasarkan fenomena di atas maka pembangunan yang berstandar pada perhitungan IPM harus pula disandingkan

dengan IPG. Keadaan ini penting, mengingat pembangunan yang bersifat netral gender cenderung membangun ketimpangan karena diasumsikan kebutuhan masyarakat berdasarkan gender memiliki perbedaan baik dari segi kebutuhan hidup maupun peran serta perempuan dan laki-laki dalam pembangunan sebagai subyek. Adapun IPG merupakan Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender⁴. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang samadan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dengan perempuan.

Hal ini juga dapat dilihat dari perkembangan pembangunan di Kabupaten Bekasi dimana program pembangunan secara fisik memiliki perkembangan yang cukup pesat, seperti pembangunan infrastruktur yang mendorong terjadi pertumbuhan industri dan ekonomi serta pembangunan pusat-pusat perdagangan, perniagaan dan jasa. Namun apakah dengan keadaan ini sudah mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bekasi terutama dalam konteks mengurangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam pembangunan?

Secara Nasional, semangat dan komitmen pemerintah untuk melaksanakan strategi pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan melalui pengarusutamaan gender (PUG) tidak pernah kendur. Setidaknya, hal tersebut menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago tecermin dari terus membaiknya Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menggambarkan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, meningkat dari 67,2 pada tahun 2013 menjadi 69,6 pada 2015.⁵

⁴ <http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=4>, diakses tanggal 18 November 2019

⁵ <http://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/menteri-andrinof-indeks-pembangunan-gender-ipg-terus-meningkat/> diakses tanggal 5 September 2019

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dengan cara menggunakan perspektif gender dalam proses pembangunan. PUG adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses, partisipasi dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program dan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan data IPG (Indeks Pembangunan Gender) di Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan seperti tahun 2009 sampai dengan 2011⁶, yaitu dari 58,06 pada tahun 2009 menjadi 58,85 pada tahun 2010, dan 59,87 pada tahun 2011. Keberhasilan pembangunan yang terus diupayakan dengan konsep pengarusutamaan gender memberi dampak positif bagi kaum perempuan. Angkat IPG ditahun 2013 meningkat menjadi 60,25. Peningkatan angkat IPG yang sama terjadi juga terjadi di tahun 2014 menjadi 60,96. Data terbaru di tahun 2015, IPG Kabupaten bekasi terus mengalami peningkatan menjadi 61,67 dengan rasio IPG terhadap IPM sebesar 82,31⁷. Namun berdasarkan data ini, tingkat IPG di Kabupaten Bekasi belum memenuhi ideal karena nilainya masih rendah sebagaimana rumusan perhitungan berikut ini, UNDP⁸ mengelompokan tingkat pembangunan manusia kedalam empat kategori, yaitu:

1. Kelompok tinggi, jika $IPM / IPG \geq 80$,
2. Kelompok menengah atas, jika $IPM / IPG 66 \leq x < 80$,
3. Kelompok menengah kebawah, jika $IPM / IPG 50 \leq x < 66$,
4. Kelompok rendah, jika $IPM / IPG < 50$.

Berdasarkan rumusan UNDP itu maka dapat disimpulkan tingkat IPG di Kabupaten Bekasi masih berada pada kategori kelompok menengah kebawah. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bekasi untuk

⁶ Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2005-2012, Kerjasama BPS dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hal 23

⁷ BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

⁸ Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2005-2012, Kerjasama BPS dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hal. 5

berupaya meningkatkan indikator IPGnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat hingga tingkat daerah dengan pembangunan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dilandaskan pada pasal 27 UUD 1945 dan diperkuat melalui ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW)*) kedalam UU No.7 tahun 1984, serta landasan aksi dan deklarasi Beijing hasil konferensi tentang perempuan keempat di Beijing pada tahun 1995 (Azis: 2004).

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan gender, sehingga berbagai ketimpangan sebagai akibat dari masalah struktural dan nilai-nilai sosial budaya yang telah lama ada, dan berkembang dapat segera diatasi, terlebih ditubuh Pemerintahan Daerah baik Kota maupun Kabupaten sebagai bagian integral dari upaya untuk melakukan pengarusutamaan gender dan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak.

B. Komitmen Pemerintah

Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam proses pembangunan dewasa ini semakin diakui sebagai kebutuhan dalam konteks pembangunan nasional. Hal tersebut diperkuat dengan telah dilaksanakannya intruksi presiden (Inpres) No.9 tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional, yaitu suatu intruksi Presiden kepada semua Menteri, Lembaga Tinggi Negara, Panglima Angkatan Bersenjata, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan PUG dalam keseluruhan proses perencanaan dari seluruh kebijakan dan program pembangunan.

Sebagai hasil dari upaya pelaksanaan PUG, khususnya pada tahap perencanaan, dapat dilihat dari program-program

pembangunan nasional yang dicanangkan secara universal, yaitu terhadap 19 program pembangunan yang responsif gender. Program-program tersebut mencakup 5 sektor pembangunan yaitu di bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial budaya.

Gambar 1.1.
Komponen PUG dalam Inpres No. 9 Tahun 2000



Komponen PUG (Inpres 9/2000)

No.	KOMPONEN
1	Komitmen
2	Kebijakan
3	Kelembagaan
4.	Sumber Daya
5.	Data & Sistem Informasi
6	Instrumen/Tool
7.	Civil society

Pada setiap rencana pembangunan tahunan (repeta) upaya PUG terus dilakukan, dan hasil nyata yang diperoleh adalah bertambahnya program yang responsif gender. Hingga repeta 2016, jumlah program yang telah responsif pada konteks gender telah bertambah menjadi 50 program, yang terdapat pada sektor-sektor pembangun: ketenagakerjaan, pendidikan, hukum, pertanian, koperasi dan UKM, politik, kesejahteraan sosial, keluarga berencana, kesehatan, dan lingkungan hidup. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, peningkatan kualitas hidup perempuan merupakan salah satu dari agenda menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis.

Bahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015 dan 2016, pengarusutamaan gender telah ditetapkan sebagai salah satu prinsip pengarusutamaan yang harus dilakukan oleh seluruh kegiatan pembangunan. Untuk keperluan kajian tersebut, terdapat 5 (lima) aspek yang perlu dikaji. Kelima aspek tersebut dianggap merupakan prasyarat dalam proses melaksanakan PUG. Aspek-aspek tersebut adalah: (1) dukungan politik; (2) kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender; (3) tersedianya kelembagaan PUG; (4) data dan informasi yang terpilah menurut jenis kelamin dalam sistem; dan (5) kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan dan mengawal PUG.

Dokumen RPJMN 2015-2019 telah secara tegas menjelaskan arah kebijakan dan strategi peningkatan kesetaraan gender yang ditujukan untuk:

Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai pembangunan yang dilakukan melalui strategi: (1) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun daerah; (2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan (3) Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.

Kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, yang dilakukan melalui strategi: (1) Peningkatan pemahaman penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (2) Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan; serta (3) Peningkatan efektivitas pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi

kehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan antara lain untuk: (1) Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender; (2) Pelaksanaan *review* dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan agar berspektif gender; (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk dapat memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam menerapkan PUG; (4) Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha dalam penerapan PUG; (5) Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat; (6) Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah; (7) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG.

Kebijakan dan strategi peningkatan kesetaraan gender diatas oleh BAPPENAS sejak awal memberikan gambaran kendala dan hambatan yang akan ditemui dan kalau tidak ditangani segera akan menjadi penyebab kegagalannya. Beberapa hal yang menjadi penyebab, adalah sebagai berikut:

1. Payung hukum yang menyatakan tentang keharusan melaksanakan PUG disetiap sektor / lembaga baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah, tidak tersosialisasi dengan baik.
2. PUG lebih dipahami sebagai proyek kegiatan untuk perempuan atau pemberdayaan perempuan semata, dan belum dipahami sebagai strategi pembangunan yang sifatnya *cross-cutting*, menyeluruh dan terintegrasi;
3. PUG belum melembaga;
4. Data dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin masih terbatas. Tidak ada keharusan untuk mengumpulkan

- data terpilah menurut jenis kelamin, apalagi digunakan untuk keperluan analisis; dan
5. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mampu melaksanakan analisis gender dan pendukung pelaksanaan PUG ditingkat internal pemerintah.

Oleh sebab itu, sesuai dengan salah satu fungsi BAPPENAS yaitu melakukan koordinasi dan peningkatan keterpaduan dan penyusunan rencana dan program pembangunan nasional (surat keputusan menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS No. 050/M.PPN/03/2002), Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan, Bappenas memandang perlu memperluas kajian gender dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan PUG di beberapa bidang terutama bagi daerah.

Gambar 1.2 Arah Strategi PPRG dalam PUG



Kerangka analisis untuk tujuan pertama yaitu evaluasi pengarusutamaan gender (PUG). Adapun metode yang dipakai dalam adalah kombinasi dari sejumlah piranti kajian baik kuantitatif maupun kualitatif. Sifat analisis kajian yang

digunakan adalah deskriptif analisis. Dimulai dengan menelaah dokumen dasar perencanaan program pembangunan Dinas atau Badan yang ada, ini mencakup rencana strategis, pedoman umum perencanaan program pembangunan, kebijakan pembangunan, meta analisis, hasil kajian evaluasi, dan dokumen lain yang relevan dari setiap sektor yang terpilah

Berdasarkan informasi dan gambaran yang terkumpul, disusun suatu *framework* dengan mengidentifikasi beberapa variabel kunci yang kemudian dijabarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang relevan, untuk memandu proses kajian.

Gambar 1.3
Disain Alur Pikir Pembangunan Responsif Gender



Asumsinya adalah secara ideal pelaksanaan PUG dapat berjalan dalam suatu Dinas atau Badan di lingkungan Pemda Kabupaten Bekasi, jika tersedia paling tidak ada 6 (enam) aspek, yaitu:

1. Adanya dukungan politik (komitmen) dari Kepala Daerah/pimpinan/pengambil kebijakan/*stakeholder* lainnya;
2. Adanya program / kegiatan yang bersifat responsif gender sebagai suatu keniscayaan;

3. Adanya kelembagaan baik struktural maupun fungsional sebagai acuan dalam pelaksanaan PUG di Dinas/Badan yang bersangkutan;
4. Tersedianya dan efektifnya sistem data dan informasi yang terpilah menurut jenis kelamin;
5. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memahami gender dan mampu melaksanakan dan mengawal PUG; dan
6. Tersedianya dana untuk pelaksanaan PUG.

Metode pelaksanaan kajian dalam merancang kajian, telah disetujui bersama bahwa sifat kajian ini adalah partisipatori. Pada prinsipnya, pendekatan partisipatori lebih memberikan waktu dan ruang untuk berdiskusi dua arah antara tim kajian dengan para responden.

1. *Focus Group Discussion* (FGD), forum FGD menjadi piranti yang penting dalam mengumpulkan informasi data;
2. *Briefing* dan konsultasi dengan para pimpinan, pengelola (unit) dan anggota staf (seperti badan perencanaan, sekretaris daerah yang berkaitan dengan PUG, *focal point gender*, pokja gender, dll) untuk mendapatkan gambaran tentang budaya pemerintah daerah, termasuk persepsi serta perlakuan lembaga terhadap isu gender dalam perencanaan program pada khususnya;
3. Wawancara dilakukan dengan kepala Dinas dan Badan serta pihak terkait lainnya yang dianggap kompeten dan terkait dari beberapa bidang Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;
4. Telaah dokumen dilakukan secara sistematis terhadap dokumen perencanaan yang relevan. Khususnya Rencana Strategis (Renstra) pemerintah daerah Kabupaten Bekasi yang memuat kebijakan, strategi, target/sasaran, termasuk program dan kegiatan pembangunan, *framework* dan piranti analisis dari beberapa Dinas atau Badan terpilih;
5. Meta analisis terhadap hasil kajian perencanaan program yang responsif gender;
6. Kuesioner sebagai kajian cepat untuk menjajagi dukungan, kelembagaan dan mekanisme PUG serta sumber daya

manusia yang tersedia dan mampu melaksanakan analisis gender di Kabupaten Bekasi sebagai objek yang dikaji;

7. *Debriefing* dan konsultasi dengan para pejabat Dinas dan Badan dan anggota staf yang berkaitan dengan kegiatan PUG, *gender focal point*, Pokja Gender.

BAB II

PEMBANGUNAN BERBASIS GENDER

A. Definisi Gender dan Pembangunan

Kata gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu “gender”. Jika merujuk pada kamus bahasa Inggris tidak secara jelas dibedakan antara *sex* dan *gender*. Sering kali gender dipersamakan dengan seks (jenis kelamin; laki-laki dan perempuan). Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Dalam pendekatan ilmu sosial orang yang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender adalah Aan Oakley (1972) yang mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia. Pada sumber lain⁹, Oakley (1972) dalam *sex, gender and society* menuturkan bahwa gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan.

“Gender is about social relationship. Gender is an analytical concept. It is socially determined and not based on the sex of the individual. Sex refers to the biological differences between women and men. The sex of the individual is determined by biology (we are born with it and usually cannot change our sex unless we have a lot of money). Gender is socially constructed. We grow up with it and it can and does, change over time. We can change gender relations.”

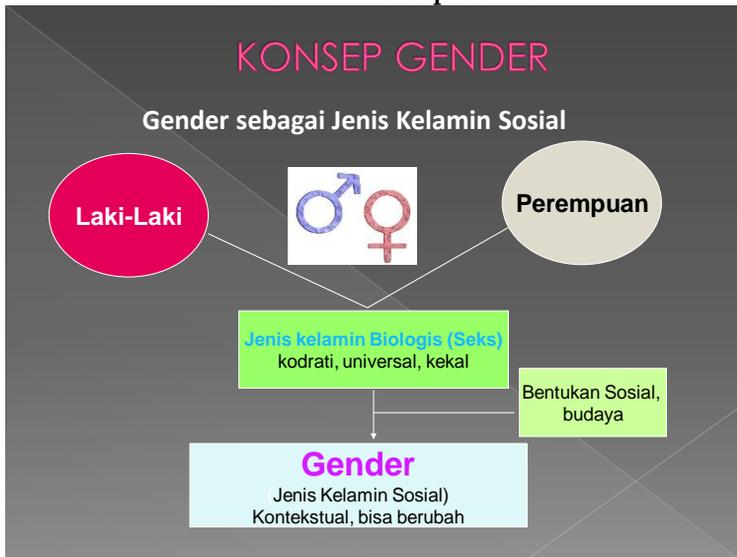
“Gender in Local Government: A Sourcebook for Trainers”
dari UN Human Settlements Program (2008)

⁹ Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Penerbit Pustaka Pelajar, 1999, hal 71

Perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin (*sex*) adalah kodrat Tuhan maka secara permanen berbeda dengan pengertian gender. Gender merupakan *behavioral differences* (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan merupakan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Dalam *The Cultural Of Sexuality* sebagaimana diuraikan oleh Caplan (1987) bahwa *Behavioral differences* (perbedaan perilaku) antara perempuan dan laki-laki bukanlah sekedar biologis, namun melalui proses kultural dan sosial. Dengan demikian, gender dapat berubah dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin biologis akan tetap tidak berubah sampai kapanpun.

Gender tidak bersifat universal namun bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain dari waktu ke waktu. Namun demikian, ada dua elemen gender yang bersifat universal, yaitu: 1) Gender tidak identik dengan jenis kelamin 2) Gender merupakan dasar dari pembagian kerja disemua masyarakat (Gallery, 1987).

Gambar 2.1 Konsep Gender



Fakih (2006: 71) mengemukakan bahwa gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender¹⁰. Sedangkan konsep gender lainnya sebagaimana yang diungkapkan Mansour Fakih dalam bukunya *analisis gender & Transformasi sosial* adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural.

Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah-lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri dan sifat itu merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah-lembut, keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu maupun dari tempat ke tempat yang lain. Misalnya perempuan di daerah Bali terlihat lebih perkasa dengan melaksanakan tugas laki-laki seperti di daerah lain. Seperti membangun rumah, membenarkan genteng, dll. Sangat berbeda dengan kebiasaan perempuan di Indonesia pada umumnya, yakni bertugas melaksanakan urusan dapur dan merawat anak saja. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lainnya, itulah yang dikenal dengan konsep gender.¹¹

Konsep gender adalah suatu sifat yang melekat baik pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan atau dibentuk secara sosial maupun kultural dengan akibat terjalannya hubungan sosial yang membedakan fungsi dan tanggung jawab kedua jenis kelamin itu. Gender bukanlah kodrat atau ketentuan Tuhan dan karenanya berkaitan dengan

¹⁰ Mansour Fakih, *Bias Gender Dalam Pembangunan*, Penerbit Pustaka Pelajar, 2006, hal 71.

¹¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Penerbit Pustaka Pelajar, 1999, hal 8

proses keyakinan tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan diharapkan untuk bersikap, bertindak, dan berperan sesuai dengan ketentuan sosial dan budaya dimana mereka berada, dibuat, dan dikonstruksikan oleh masyarakat melalui berbagai macam sektor kehidupan (ideology, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan). Dengan kata lain gender adalah jenis kelamin sosial.

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata jenis kelamin (seks). Seks adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang secara fisik melekat pada masing-masing jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan yang sifatnya permanen dan universal. Perbedaan biologis hormonal dan patologis antara perempuan dan laki-laki. Jenis kelamin atau seks tidak dapat berubah, permanen dan tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan serta bersifat mutlak. Sedangkan gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal pensifatan, peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh masyarakat, oleh karena itu gender bersifat relatif, dapat berubah dan dapat dipertukarkan. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan perkembangan jaman.

Timbulnya kerancuan dan pemutarbalikan makna mengenai perbedaan gender dan seks merupakan suatu masalah yang perlu dijernihkan. Belakangan ini timbul pemahaman di masyarakat bahwasannya gender yang pada dasarnya merupakan konstruksi sosial, justru dianggap sebagai kodrat Tuhan. Sebaliknya, yang sebagian besar dianggap kodrat Tuhan khususnya bagi kaum wanita adalah konstruksi sosial dan kultural. Misalnya mendidik anak, merawat dan mengelola kebersihan dan keindahan rumah tangga yang merupakan suatu konstruksi kultural dalam masyarakat tertentu justru dianggap sebagai kodrat Tuhan bagi masyarakat tertentu. Oleh karena itu boleh jadi urusan mendidik anak dan merawat kebersihan rumah tangga dapat dilakukan oleh kaum laki-laki.

Sehingga jenis pekerjaan itu bisa dipertukarkan dan tidak bisa bersifat universal.

Dari semua definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu/zaman, suku/ras/bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, negara ideologi, politik, hukum, dan ekonomi¹². Oleh karenanya gender bukanlah kodrat Tuhan melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sifat-sifat relatif. Hal tersebut bisa terdapat pada laki-laki maupun pada perempuan. Sedangkan jenis kelamin (seks) merupakan kodrat Tuhan (ciptaan Tuhan) yang berlaku dimana saja dan sepanjang masa yang tidak dapat berubah dan dipertukarkan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochim Dahuri, 2004) Unsur-unsur yang harus terdapat dalam pembangunan yaitu:

1. Ada perencanaan
2. Ada perubahan sosial
3. Pemenuhan kebutuhan manusia (gender)
4. Pemenuhan *nation building*
5. Cara-cara untuk mencapai kehidupan dan lingkungan sosial yang lebih baik (bukan kerusakan)
6. Keadilan sosial (gender)

Pembangunan berkaitan dengan usaha suatu bangsa untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kesejahteraan akan tercapai apabila seluruh masyarakat baik laki-laki atau perempuan (*gender*) dapat menikmati hasilnya. Isu gender dalam pembangunan dasarnya

¹² Rianti Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, 2008, hal. 8

adalah kerjasama dalam proses pembangunan. Dalam hal ini antara laki-laki dan perempuan saling bekerja sama mulai dari tahap awal sampai tahap akhir dalam rangka terwujudnya pembangunan itu sendiri. Isu gender menjadi suatu ketimpangan apabila dalam pembangunan perempuan hanya dijadikan obyek. Kenyataannya, perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan yang satu sama lain saling menghasilkan.

Pembangunan menjadikan laki-laki dan perempuan serta kelompok anak sebagai sasaran baik obyek maupun subyek. Untuk itu setiap kebijakan pemerintah harus didasarkan pada perspektif gender yaitu membuat kebijakan dengan memandang peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan atau melihat konsep gender, agar kebijakan tersebut benar dan tidak salah sasaran. Banyak kebijakan yang dibuat oleh laki-laki yang menjabat di kursi pemerintahan yang memperdulikan pandangan perempuan, akibatnya adalah ketimpangan dimana perempuan hanya menjadi obyek pembangunan tanpa melibatkannya dalam proses pembangunan, dampaknya adalah pembangunan tersebut salah sasaran. Di bawah ini diuraikan mengenai pentingnya menggunakan perspektif gender, yaitu:

1. Memberikan pemahaman tentang gender dalam konsep pembangunan.
2. Dapat menganalisis mengapa terjadi diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin, untuk kemudian memberikan solusi-solusi atas permasalahan tersebut.
3. Membedakan antara gender dengan seks, serta membedakan antara kodrat dengan peran dan fungsi.
4. Dapat menghapuskan stigma atau pelebelan negatif terhadap perempuan yang dianggap lemah, serta memberikan pemahaman bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai peran dan fungsi yang setara.
5. Agar tidak ada pihak yang merasa terdiskriminasi dalam proses pembangunan maupun pembuatan kebijakan.

6. Agar dalam proses pembangunan tidak terjadi salah sasaran karena semua pihak dapat menikmati.

Tahapan dalam pembangunan dimulai dari pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian barulah pada tahap selanjutnya yaitu pengejawantahan konsep WID (*Women In Development*), WAD (*Women And Development*), GAD (*Gender And Development*) adalah perempuan di dalam pembangunan, secara umum bertujuan untuk mengintegrasikan perempuan di dalam pembangunan. WID lebih menekankan pada partisipasi perempuan dalam pembangunan. Tetapi pada kenyataannya dalam konsep ini perempuan hanya menjadi obyek dalam pembangunan. Dalam banyak hal, kaum Perempuan tidak dilibatkan dalam proses pembangunan tersebut. Perempuan hanya menjadi penikmat pembangunan tanpa melihat perspektif gender antara peran laki-laki dan perempuan. Sehingga masih terdapat ketimpangan terhadap perempuan dalam pembangunan sebagaimana yang bisa kita saksikan secara kasat mata.

WAD (*Women And Development*) yaitu perempuan dan pembangunan artinya perempuan dilibatkan dalam proses pembangunan. Kata "dan" dalam WAD lebih tepat karena menekankan mutu (kualitas kesetaraan perempuan). Konsep WAD mengandung pengertian bahwa perempuan tidak cukup hanya dengan berpartisipasi, tapi juga harus memperlihatkan keberdayaan dan kemampuannya (pemberdayaan perempuan). Tetapi WAD mempunyai dampak *double bourden* (pekerjaan ganda) bagi perempuan yaitu perempuan menjadi obyek dan subyek. Contohnya, perempuan harus mengurus rumah tangga dan juga bekerja di luar rumah. Dalam hal ini masih terdapat kesenjangan karena *double bourden* tersebut. Konsep ini juga menekankan bahwa antara publik dan domestik masih bertolak belakang; publik berbicara tentang laki-laki dan domestik tentang perempuan.

GAD (*Gender And Development*) yaitu peran dan fungsi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, terdapat peran yang sama antara laki-laki dan perempuan didalam pembangunan. Kedua belah pihak mestinya dilibatkan, artinya telah ada kesepakatan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. GAD merupakan konsep pembangunan yang berprespektif gender. Jadi, GAD lebih menekankan pada prinsip hubungan kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki.

Gender dan pembangunan juga menjadi perhatian dunia, terbukti dengan dimasukkannya kesetaraan gender didalam program MDG's. MDG's atau Millenium Development Goals adalah kesepakatan internasional yang merumuskan delapan butir tujuan/sasaran program pembangunan, untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 8 tujuan pembangunan millenium (*Millenium Development Goals*) yang ditetapkan harus dicapai selambat-lambatnya tahun 2015:

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
2. Memenuhi standart pendidikan dasar untuk semua orang
3. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Mengurangi angka kematian bayi
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya
7. Mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

B. Analisis Gender

Sebelum menguraikan tentang analisis gender dan pembangunan, maka sangat perlu untuk dipahami pengertian analisis gender sebagai suatu proses menganalisis data informasi secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkannya

kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab proses pembangunan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tujuan dari pelaksanaan analisis gender:

1. Upaya mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender
2. Mengidentifikasi aspek kesenjangan gender (peran, akses, control dan manfaat yang diperoleh)
3. Merumuskan permasalahan sebagai akibat terjadinya kesenjangan gender
4. Mengidentifikasi langkah-langkah/tindakan intervensi yang dilakukan

Gambar 2.2 Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender



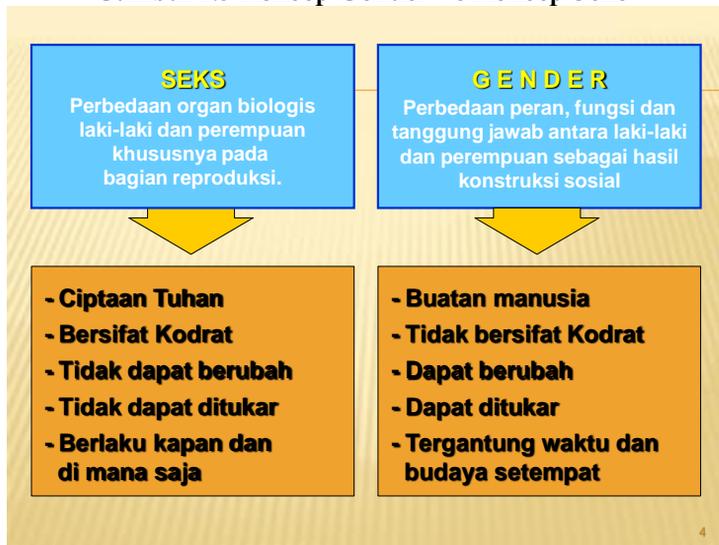
Menurut Gayle Rubin (1976) yang tercatat pertama kali mempopulerkan konsep kesetaraan gender, yang mendefinisikan gender sebagai *“social construction of difference between the sexes refers to social relationship between women and man”*. Berdasarkan definisi tersebut, menitik beratkan konsep gender sebagai perbedaan peran perempuan dan laki-laki dimana yang membentuknya adalah konstruksi sosial dan kebudayaan, jadi bukan karena konstruksi sosial dan kebudayaan yang dibawa sejak lahir. Jika *“jenis kelamin”* adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, maka *“gender”* adalah sesuatu yang

dibentuk karena pemahaman yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

1. Teori dan Konsep Gender

Membahas pemasalahan gender berarti membahas permasalahan perempuan dan juga laki-laki dalam kehidupan masyarakat. Dalam pembahasan mengenai gender, termasuk kesetaraan dan keadilan gender dikenal adanya 2 aliran atau teori *nurture* dan teori *nature*. Namun demikian dapat pula di kembangkan satu konsep teori yang diilhami dari dua konsep tersebut yang merupakan kompromistis atau keseimbangan yang disebut teori *equilibrium*.

Gambar 2.3 Konsep Gender Vs Konsep Seks



a. Teori Nurture

Menurut teori *nurture* adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil kontruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan cenderung tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kontruksi sosial menempatkan perempuan

dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai kelas proletar.

b. Teori Nature

Menurut teori *nature* adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya. Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa ada beberapa kelemahan konsep *nature* yang dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat, yaitu terjadi ketidak-adilan gender, maka beralih ke teori *nature*. Agregat ketidak-adilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan, namun ketidak-adilan gender ini berdampak pula terhadap laki-laki.

c. Teori *Equilibrium*

Disamping kedua aliran tersebut terdapat kompromistis yang dikenal dengan konsep keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki-laki, pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan diantara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain. R.H Tanwey

menyebutkan bahwa keragaman peran apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, atau budaya pada hakikatnya adalah realita kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang perlu dikelola secara arif dan bijaksana.

Perilaku manusia/individu dipengaruhi oleh konstruksi biologis, sosial, dan agama. Dalam upaya mengubah perilaku seseorang terhadap pemahaman gender, ada beberapa istilah mengenai konsep perubahan perilaku gender yaitu:

- a. **Buta Gender (*gender blind*)**, yaitu kondisi/keadaan seseorang yang tidak memahami tentang pengertian/konsep gender karena ada perbedaan kepentingan laki-laki dan perempuan.
- b. **Sadar Gender (*gender awareness*)**, yaitu kondisi/keadaan seseorang yang sudah menyadari kesamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki.
- c. **Peka/Sensitive Gender (*gender sensitive*)**, yaitu kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan dan aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender (d disesuaikan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan).
- d. **Mawas Gender (*gender perspective*)**, yaitu kemampuan seseorang memandang suatu keadaan berdasarkan perspektif gender.
- e. **Peduli/Responsif Gender (*gender concern/ responsive*)**, merupakan keadaan dimana kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang sudah dilakukan dengan memperhitungkan kepentingan kedua jenis kelamin.

2. Ketimpangan Gender

Gender differences (perbedaan gender) sebenarnya bukan suatu masalah sepanjang tidak menimbulkan *gender inequalities* (ketidakadilan gender). Namun yang menjadi masalah adalah ternyata *Gender differences* ini telah menimbulkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-

laki dan utamanya terhadap kaum perempuan. Secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya dapat hamil, melahirkan dan menyusui, kemudian muncul *gender role* (peran gender) sebagai perawat, pengasuh dan pendidik anak. Dengan demikian *gender role* dianggap tidak menimbulkan masalah dan tidak perlu digugat. Namun yang menjadi masalah dan perlu dipertanyakan adalah struktur *gender inequalities* yang ditimbulkan oleh *gender role* dan *gender differences*.

Gender inequqlities (ketidakadilan gender) merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban sistem tersebut. Dengan demikian agar dapat memahami perbedaan gender yang menyebabkan ketidakadilan maka dapat dilihat dari berbagai manifestasinya, yaitu sebagai berikut:

a. Marginalisasi

Sesungguhnya penyebab timbulnya kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat merupakan akibat dari proses marginalisasi yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian. Marginalisasi disebabkan antara lain disebabkan oleh penggusuran maupun eksploitasi. Bentuk marginalisasi yang paling dominan terjadi terhadap kaum perempuan adalah disebabkan gender. Meskipun tidak setiap bentuk marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan gender, namun yang dipermasalahkan disini adalah bentuk marginalisasi yang disebabkan oleh *gender differences* (perbedaan gender).

Perbedaan gender ini sebagai akibat dari berbagai jenis dan bentuk, tempat dan waktu, serta mekanisme dari proses marginalisasi kaum perempuan. *Gender Differences* (perbedaan gender) ini bila ditinjau dari sumbernya dapat berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, adat istiadat & tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Misalnya program Keluarga Berencana (KB) yang lebih

memfokuskan kepada para ibu-ibu dan kaum laki-laki tidak dilibatkan. Padahal obyek dari program KB tersebut adalah bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Para ibu yang mengikuti program KB biasanya pertumbuhan tubuhnya akan lebih besar dan itu akan menjadi salah satu kendala bagi suami yang menginginkan para istrinya untuk tetap bertubuh proporsional. Tapi disisi lain, hanya perempuan yang didesak untuk ber-KB. Sehingga menyebabkan adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan.

b. Subordinasi

Subordinasi timbul sebagai akibat adanya pandangan gender terhadap kaum perempuan. Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting umumnya muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan itu emosional atau irasional sehingga perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin merupakan bentuk dari subordinasi yang dimaksud. Proses subordinasi yang disebabkan karena gender terjadi dalam segala macam bentuk dan mekanisme yang berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Dalam kehidupan di masyarakat, rumah tangga dan bernegara banyak kebijakan yang dikeluarkan tanpa menganggap penting keberadaan dan peran kaum perempuan. Padahal keberadaan perempuan juga sangat penting dalam posisi dan konteks tertentu misalnya dalam membuat sesuatu kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap perempuan, tentu yang lebih paham dan mengerti adalah kaum perempuan itu sendiri.

c. Stereotipe

Pelabelan dan penandaan/stigma negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu, secara umum dinamakan *stereotip*. Akibat dari stereotipe ini biasanya timbul diskriminasi dan berbagai ketidakadilan. Salah satu bentuk stereotipe ini adalah yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali stereotipe yang

umumnya dilekatkan kepada kaum perempuan yang terjadi dimasyarakat sehingga berakibat menyulitkan, membatasi, memiskinkan dan merugikan kaum perempuan. Adanya anggapan di masyarakat bahwa perempuan yang bersolek biasanya dilakukan untuk menarik perhatian lawan jenis, sehingga menyebabkan terjadinya kasus kekerasan maupun pelecehan seksual, hal ini selalu dikaitkan bahwa perempuan sebagai korban yang disalahkan. Selain itu ada juga anggapan dari masyarakat yang melihat bahwa tugas perempuan adalah melayani suami. Stereotipe ini memang suatu hal yang wajar. Namun berakibat pada menomor duakan pendidikan bagi kaum perempuan.

d. Violence

Violence (kekerasan) merupakan *assault* (invasi) atau serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya pada perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender. Bentuk dari kekerasan ini seperti pemerkosaan dan pemukulan, hingga pada bentuk yang lebih halus lagi seperti *sexual harrasement* (pelecehan) dan menciptakan ketergantungan. *Violence* terhadap perempuan banyak terjadi disebabkan oleh faktor stereotipe gender. *Gender violence* pada dasarnya disebabkan karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada di dalam masyarakat.

e. Beban kerja

Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama jika dibanding dengan kaum laki-laki. Beban kerja yang diakibatkan oleh bias gender tersebut kerap kali diperkuat dan disebabkan oleh adanya keyakinan/pandangan di masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis pekerjaan

perempuan, seperti semua pekerjaan domestik dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki, dan dikategorikan sebagai pekerjaan yang bukan produktif sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi Negara.

Ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, kekerasan, stereotipe dan beban kerja telah terjadi di berbagai tingkatan di masyarakat. *Pertama*, wujud dari ketidakadilan gender terjadi ditingkat Negara, baik pada suatu negara maupun organisasi antar negara. Banyak kebijakan negara dan hukum negara, perundang-undangan serta program kegiatan yang masih mencerminkan sebagai dari wujud ketidakadilan gender. *Kedua*, wujud dari ketidakadilan ini juga terjadi ditempat kerja, organisasi maupun dunia pendidikan. Banyak aturan kerja, manajemen, kebijakan keorganisasian dan kurikulum pendidikan yang masih melanggengkan ketidakadilan gender. *Ketiga*, dalam adat istiadat, dibanyak kelompok maupun etnis tertentu maupun dalam tafsir keagamaan terjadi perwujudan ketidakadilan gender. Mekanisme interaksi dan pengambilan keputusan di masyarakat masih mencerminkan ketidakadilan gender. *Keempat*, ketidakadilan gender juga terjadi di lingkungan rumah tangga. Mulai dari proses pengambilan keputusan, pembagian kerja, hingga interaksi antar anggota keluarga. Dengan demikian rumah tangga menjadi salah satu ruang kritis dalam sosialisasi ketidakadilan gender. Dan *kelima*, adalah ketidakadilan gender yang sudah mengakar di dalam suatu keyakinan yang menjadi ideologi bagi kaum perempuan dan laki-laki. Dan hal ini sudah sangat sulit untuk diubah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa manifestasi ketidakadilan gender ini adalah mengakar dalam hampir segala aspek kehidupan

mulai dari keyakinan di masing-masing orang, keluarga hingga pada tingkat Negara yang bersifat global. Hal ini akan mengakibatkan munculnya asumsi yang akan menjadi kebiasaan, bahwa gender itu seakan-akan menjadi kodrat. Struktur dan sistem ketidakadilan gender yang diterima lambat laun mulai tercipta dan sudah tidak lagi dirasakan ada sesuatu yang salah.

3. Statistik Gender dan Data Terpilah

Adapun pengertian statistik gender dan data terpilah adalah suatu metode dalam pengumpulan data, interpretasi untuk dianalisis dan diambil kesimpulan yang valid dengan menggunakan perspektif gender yaitu berupa data terpilah berdasarkan jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Data seperti ini muncul untuk lebih dapat mengetahui karakteristik atau kondisi perempuan dan laki-laki didasari oleh asumsi bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda yang mempengaruhi kondisi ekonomi. Sebagai contoh, dalam sensus nasional dan laporan-laporan surveisering kali tidak tersedia data terpilah gender; sehingga tidak memungkinkan untuk memonitor perubahan dalam akses sumber daya sepanjang waktu. Kategori-kategori¹³ tertentu mencerminkan asumsi-asumsi berkaitan dengan peran ekonomis, contohnya, penggunaan istilah ‘kepala keluarga’ sering kali menghilangkan rumah tangga yang tidak dilaporkan dimana perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama. Tidak dimasukkan dalam laporan tentang pekerja yang tidak dibayar mempengaruhi pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan lebih banyak dari laki-laki.

a. Kekerasan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 yang kemudian dirubah menjadi UU RI No 35 tahun 2014

¹³ Genderpedia, <http://genderpedia.blogspot.com/2014/04/statistik.html>, diakses tanggal 24 September 2017

Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan definisi yang berlaku secara hukum dan nasional mengenai definisi anak. "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Anak menjadi objek yang rentan terhadap tindakan kekerasan. Karena anak belum atau tidak memiliki kemampuan optimal untuk melindungi dirinya dan secara kodrati mereka lemah. Anak perlu untuk dilindungi karena secara teologi anak merupakan titipan dari Allah SWT, bukan milik siapapun termasuk orang tuanya.

Menurut WHO (dalam Bagong. S, dkk, 2015), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Secara filosofis, fenomena kekerasan merupakan sebuah gejala kemunduran hubungan antar pribadi, di mana orang tidak lagi bisa duduk bersama untuk memecahkan masalah. Hubungan yang ada hanya diwarnai dengan ketertutupan, kecurigaan, dan ketidakpercayaan. Dalam hubungan seperti ini, tidak ada dialog, apalagi kasih sayang. Semangat mematikan lebih besar dari pada semangat menghidupkan, semangat mencelakakan lebih besar dari pada semangat melindungi.

Komnas Perempuan (2016) menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja. Termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara

sengaja meng-kungkung kebebasan perempuan. Tindakan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat

Kristi E Purwandari dalam Archie Sudiarti Luhulima mengemukakan beberapa bentuk kekerasan sebagai berikut:

- 1) Kekerasan fisik, seperti: memukul, menampar, mencekik dan sebagainya
- 2) Kekerasan psikologis, seperti: berteriak, menyumpah, mengancam, melecehkan dan sebagainya.
- 3) Kekerasan seksual, seperti: melakukan tindakan yang mengarah keajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.
- 4) Kekerasan finansial, seperti: mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan sebagainya.
- 5) Kekerasan spiritual, seperti: merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktekan ritual dan keyakinan tertentu
- 6) Kekerasan verbal, seperti: Bullying, mengumpat, menyebut nama seseorang dengan tidak semestinya, dll.

Dalam konteks kekerasan yang secara spesifik terjadi terhadap anak, Terry E. Lawson, salah satu tokoh psikiater dunia yang merumuskan definisi tentang kekerasan terhadap anak, menyebut ada empat macam kekerasan (*abuse*), yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*.

Dalam Perspektif gender tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dipahami melalui konteks sosial. Menurut Berger (1990), perilaku individu sesungguhnya merupakan produk sosial, dengan demikian nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat turut membentuk perilaku individu artinya

apabila nilai yang dianut suatu masyarakat bersifat patriakal yang muncul adalah superioritas laki-laki dihadapan perempuan, manifestasi nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat adalah dominasi laki-laki atas perempuan¹⁴.

Mave Cormack dan Stathern menjelaskan terbentuknya dominasi laki-laki atas perempuan ditinjau dari teori *nature and culture*. Dalam proses transformasi dari *nature* ke *culture* sering terjadi penaklukan. Laki-laki sebagai *culture* mempunyai wewenang menaklukan dan memaksakan kehendak kepada perempuan (*nature*). Secara kultural laki-laki ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari perempuan, karena itu memiliki legitimasi untuk menaklukan dan memaksa perempuan. Dari dua teori ini menunjukkan gambaran aspek sosiokultural telah membentuk *social structure* yang kondusif bagi dominasi laki-laki atas perempuan, sehingga mempengaruhi perilaku individu dalam kehidupan berkeluarga.

Upaya yang bersifat komprehensif terhadap upaya menanggulangi kekerasan pada perempuan dan anak termaktup dalam pasal (1), Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1993).

1) Aspek Budaya :

- a) Kuatnya pengertian yang bersumber pada nilai-nilai budaya yang memisahkan peran dan sifat gender laki-laki dan perempuan secara tajam dan tidak setara.
- b) Sosialisasi pengertian tersebut diantara lain melalui lembaga keluarga, lembaga pendidikan, agama, dan media massa, menyebabkan berlakunya keyakinan dan tuntutan

¹⁴ Komnas Perempuan (2002). *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: Ameeopro

- c) laki-laki dan perempuan punya tempat dan perannya sendiri-sendiri yang khas dalam keluarga/perkawinan/berpacaran.
 - d) laki-laki lebih superior dari pada perempuan, dan mempunyai hak penuh untuk memperlakukan perempuan seperti barang miliknya
 - e) keluarga adalah wilayah pribadi, tertutup dari pihak luar, dan berada di bawah kendali laki-laki
 - f) Diterimanya kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik
- 2) Aspek Ekonomi :
- a) Ketergantungan perempuan secara ekonomi pada laki-laki;
 - b) perempuan lebih sulit untuk mendapatkan kredit, kesempatan kerja di lingkup formal dan informal, dan kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan.
- 3) Aspek Hukum :
- a) Status hukum perempuan yang lebih lemah dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktek penegakan hukum;
 - b) Pengertian tentang perkosaan dan KDRT yang belum menjawab sepenuhnya kebutuhan perlindungan bagi korban dan penanganan pada pelaku.
 - c) Rendahnya tingkat pengetahuan yang dimiliki perempuan tentang hukum.
 - d) Perlakuan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya peka pada perempuan dan anak perempuan korban kekerasan.
- 4) Aspek Politik :
- a) Rendahnya keterwakilan kepentingan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik, hukum, kesehatan, maupun media.

- b) Kekerasan terhadap Perempuan masih belum sepenuhnya dianggap sebagai persoalan yang berdampak serius bagi negara,
- c) Adanya resiko yang besar bila mempertanyakan aturan agama,
- d) Terbatasnya partisipasi perempuan di organisasi politik.

Sebagian besar perempuan dan anak sering bereaksi pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan yang dihadapi. Ini memantapkan kondisi tersembunyi terjadinya tindak kekerasan pada perempuan dan anak yang diperbuat oleh laki-laki dan atau perempuan. Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan. Kaum perempuan lebih cenderung memendam sendiri persoalan tersebut, tidak tahu bagaimana menyelesaikan dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, laki-laki dominan terhadap perempuan¹⁵. Rumah tangga, keluarga merupakan suatu institusi sosial paling kecil dan bersifat otonom, sehingga menjadi wilayah domestik yang tertutup dari jangkauan kekuasaan publik. Campur tangan terhadap kepentingan masing-masing rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak pantas, sehingga timbul sikap pembiaran (*permissiveness*) berlangsungnya kekerasan di dalam rumah tangga. Menurut Murray A. Strause (1996), bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan moralitas pribadi dalam rangka mengatur dan menegakkan rumah tangga sehingga terbebas dari jangkauan kekuasaan publik.

¹⁵ Monemi Kaja Asling et.al. (2003). *Violence Against Women Increases The Risk Of Infant and Child Mortality: a case-referent Study in Niceragua*. The International Journal of Public Health, page 18

BAB III

STRATEGI PENGARUSUTAMAAN GENDER

Kerangka analisis Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan metode kombinasi dari sejumlah piranti kajian baik kuantitatif maupun kualitatif. Sifat analisis kajian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Dimulai dengan menelaah dokumen dasar perencanaan program pembangunan pemerintah pusat dan daerah (termasuk dokumen dari dinas atau badan yang ada), ini mencakup rencana strategis, pedoman umum perencanaan program pembangunan, kebijakan pembangunan, meta analisis, hasil kajian evaluasi, dan dokumen lain yang relevan dari setiap sektor yang terpilah dengan memperhatikan kondisi masyarakat secara detail baik dari segi geografis, demografi, ekonomi dan profil daerah secara keseluruhan.

Bab ini akan memberikan penjelasan keterkaitan MDG's, SDG'd kaitannya dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dengan contoh penelusuran data analisis dan strategi pengarusutamaan gender berbasis kemasyarakatan yang menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai contohnya

A. Millenium Development Goals

Millennium Development Goals (MDGs) adalah sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan pada Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional untuk menyelesaikan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan.

Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan telah diadopsi oleh 189

negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut.

Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Deklarasi ini ditandatangani pada September 2000 dengan butir kesepahaman bahwa menyetujui agar semua Negara:

1. Menghapus kelaparan dan kemiskinan

- a. Pendapatan populasi sehari \$10000.
- b. Menurunkan angka kemiskinan.

2. Mencapai pendidikan dasar universal

Setiap penduduk dunia mendapatkan pendidikan dasar.

3. Mempromosikan kesetaraan gender dan memperdayakan perempuan

Target 2005 dan 2015: mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk Tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada Tahun 2015.

4. Menurunkan angka kematian anak

Target untuk 2015 adalah mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun.

5. Meningkatkan kesehatan ibu

Target untuk 2015 adalah mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan.

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain

Target untuk 2015 adalah menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya.

7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup

- a. Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan dalam kebijakan setiap Negara dan

program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan.

- b. Pada tahun 2015 mendatang diharapkan mengurangi setengan dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat.
- c. Pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang tinggal di daerah kumuh.

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

- a. Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diterka dan tidak ada diskriminasi. Termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik, pembangunan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional.
- b. Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus Negara-negara kurang berkembang, dan kebutuhan khusus dari Negara-negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil. Ini termasuk pembebasan tarif dan kuota untuk ekspor mereka; meningkatkan pembebasan hutang untuk Negara miskin yang berhutang besar; pembatalan hutang bilateral resmi; dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk Negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan.
- c. Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang Negara-negara berkembang.
- d. Menghadapi secara komprehensif dengan Negara berkembang dengan masalah hutang melalui pertimbangan nasional dan internasional untuk membuat hutang lebih dapat ditanggung dalam jangka panjang.
- e. Mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda.
- f. Dalam kerjasama dengan pihak "*pharmaceutical*", menyediakan akses obat penting yang terjangkau untuk Negara-negara berkembang.

- g. Dalam kerja sama dengan pihak swasta. Membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi informasi dan komunikasi.

B. MDG's di Indonesia

Sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani deklarasi MDGs, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakannya serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan program pembangunan nasional baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada hakikatnya setiap tujuan dan target MDGs telah sejalan dengan program pemerintah jauh sebelum MDGs menjadi agenda pembangunan global dideklarasikan. Potret dari kemakmuran rakyat diukur melalui berbagai indikator seperti bertambah tingginya tingkat pendapatan penduduk dari waktu ke waktu, kualitas pendidikan dan derajat kesehatan yang membaik, bertambah banyaknya penduduk yang menempati rumah layak huni, lingkungan permukiman yang nyaman bebas dari gangguan alam dan aman.

Kini MDGs telah menjadi referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. Walaupun masih mengalami kendala, namun pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun Tujuan, Target dan Indikator MDGs Indonesia, adalah:

TUJUAN 1. MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN	
Target 1	Menurunkan poporsi penduduk yang tingkat pendapatannya dibawah US \$ 1 per hari menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1990 - 2015
	1. Persentase penduduk dengan pendapatan dibawah US\$ 1 (PPP) per hari
	2. Persentase penduduk dengan tingkat

- konsumsi dibawah garis kemiskinan nasional
 - 3. Indeks kedalaman kemiskinan
 - 4. Indeks keparahan kemiskinan
 - 5. Proporsi konsumsi penduduk termiskin (kuartil pertama)
- Target 2 Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1990-2015
- 1. Persentase anak-anak berusia dibawah 5 tahun yang mengalami gizi buruk (*severe underweight*)
 - 2. Persentase anak-anak dibawah 5 tahun yang mengalami gizi kurang (*moderate underweight*)

TUJUAN 2. MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA

- Target 3 Menjamin pada tahun 2015, semua anak, dimanapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar
- 1. Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (7-12 tahun)
 - 2. Angka Partisipasi Murni (APM), sekolah menengah pertama / madrasah tsanawiyah (13-15 tahun)
 - 3. Angka melek huruf usia 15 - 24 tahun

TUJUAN 3. MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

TUJUAN 4. MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK

- Target 5 Menurunkan Angka Kematian Balita sebesar dua-pertiganya dalam kurun waktu 1990 - 2015
- 1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

-
2. Angka Kematian Balita (AKBA) per 1000 kelahiran hidup
-

TUJUAN 5. MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

- Target 6 Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga-perempatnya dalam kurun waktu 1990 - 2015
1. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) per 100.000 kelahiran hidup
 2. Proporsi kelahiran yang diolong oleh tenaga kesehatan (%)
 3. Proporsi wanita 15 - 49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan alat keluarga berencana (%)
-

TUJUAN 6. MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA

- Target 7 Mengendalikan penyebaran HIV dan AIDS dan memulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015
1. Prevalensi HIV/AIDS (%)
 2. Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi (%)
 3. Penggunaan kondom pada pemakai kontrasepsi
 4. Persentase penduduk usia muda 15 - 24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)
- Target 8 Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada tahun 2015
1. Prevalensi malaria per 1000 penduduk
 2. Prevalensi tuberculosi per 100.000 penduduk
 3. Angka penemuan pasien turbekulosi BTA positif baru (%)
 4. Angka keberhasilan pengobatan pasien tuberculosi (%)
-

TUJUAN 7 MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

- Target 9 Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang.
1. Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretansatelit landsat terhadap luas daratan (%)
 2. Rasio las kawasan tertutup pepohonan berdasarkan luas kawasan hutan, kawasan lindung, dan kawasan konservasi termasuk kawasan perkebunan dan hutan rakyat terhadap luas daratan (%)
 3. Rasio luas kawasan lindung terhadap luas daratan (%)
 4. Rasio luas kawasan lindung perairan (marine protected area) terhadap luas daratan (%)
 5. Jumlah emisi karbondioksida (CO₂) (metric ton)
 6. Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) (ton)
 7. Rasio jumlah emisi karbondioksida (CO₂) terhadap jumlah penduduk Indonesia (%)
 8. Jumlah pengangguran energi dari berbagai jenis (setara barel minyak, SBM), (a) Fosil dan, (b) Non-fosil
 9. Rasio penggunaan energi (total) dari berbagai jenis terhadap Produk Domestik Bruto (%)
 10. Penggunaan energi dari berbagai jenis secara absolut(metric ton)
- Target 10 Menggunakan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar

sebesar separuhnya pada 2015

1. Proporsi rumah tangga terhadap penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (total) (%)
2. Proporsi rumah tangga / penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (pedesaan) (%)
3. Proporsi rumah tangga / penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (perkotaan) (%)
4. Cakupan pelayanan perusahaan daerah air minum (KK)
5. Proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (total) (%)
6. Proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (pedesaan) (%)
7. Proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (perkotaan) (%)

Target 11 Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020

1. Proporsi rumah tangga yang memiliki atau menyewa rumah (%)

TUJUAN 8. MEMBANGUN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN

Target 12 Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif

1. Rasio antara jumlah ekspor dan impor dengan PDB (%)
2. Rasio antara kredit dan tabungan (LDR) Bank Umum (%)
3. Rasio antara kredit dan tabungan (LDR) Bank Perkreditan Rakyat (%)

Target 13 Menangani hutang Negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam

- jangka panjang
1. Rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB
 2. Debt-to Service Ratio (DSR)
- Target 14 Bekerja sama dengan Negara lain untuk mengembangkan dan menerapkan strategi untuk menciptakan lapangan kerja yang baik dan produktif bagi penduduk usia muda
1. Tingkat pengangguran usia muda (15 - 24 tahun);
 2. Tingkat pengangguran usia muda (15 - 24 tahun) menurut jenis kelamin;
 3. Tingkat pengangguran usia muda (15 - 24 tahun) menurut provinsi;
- Target 15 Bekerja sama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi
1. Presentase rumah tangga yang memiliki telepon dan telepon seluler
 2. Presentase rumah tangga yang memiliki computer dan mengakses internet melalui computer

Sumber: Laporan pencapaian millennium development goals Indonesia 2007; BPPN Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan millennium ini menjabarkan upaya awal pemerintah Indonesia menginventarisasi situasi pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian tujuan MDGs, mengukur, dan menganalisa kemajuan seiring dengan upaya menjadikan pencapaian-pencapaian ini menjadi kenyataan, sekaligus mengidentifikasi dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah yang di butuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan ini. Dengan tujuan utama mengurangi jumlah orang dengan pendapatan di bawah upah minimum regional antara tahun 1990 dan 2015, laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, pencapaiannya lintas

provinsi di Indonesia masih terbelang tidak seimbang. Salah satu Kini *MDGs* telah menjadi referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. Walaupun masih mengalami kendala dalam implementasinya, namun pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan dibutuhkan kerja keras serta kerja sama dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat madani, pihak swasta, dan lembaga donor. Pencapaian *MDGs* di Indonesia akan dijadikan dasar untuk perjanjian kerjasama dan implementasinya di masa depan. Hal ini termasuk kampanye untuk perjanjian tukar guling hutang untuk Negara berkembang sejalan dengan Deklarasi Jakarta mengenai *MDGs* di daerah Asia-Pasifik.

C. Konsep *SDG's* 2015-2030

Konsep *MDG's* merupakan tujuan pembangunan millenium yang dimulai pada tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2015. Sejak tahun 2015 berakhir, saat itulah ujung waktu dari kesepakatan Millenium Development Goals (*MDGs*) ditetapkan. Dan, negara-negara di dunia pun mulai merumuskan sebuah *platform* berkelanjutan untuk dapat mencapai cita-cita mulia dari *MDGs* tersebut. Untuk itu, pada tanggal 25-27 September 2015 terjadi pertemuan akbar di Markas PBB di New York, dengan dihadiri perwakilan dari 193 negara. Pertemuan *Sustainable Development Summit* ini berhasil mengesahkan dokumen yang disebut *Sustainable Development Goals* (*SDGs*)

Pertemuan ini sendiri merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pada pertemuan di tempat yang sama tanggal 2 Agustus 2015. Saat itu sebanyak 193 negara anggota PBB mengadopsi secara aklamasi dokumen berjudul *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (Mengalihkan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan).

Jadi, negara-negara di dunia sekarang menyepakati sebuah *platform* baru dengan terminologi baru, yakni SDGs. Baik SDGs maupun MDGs pada dasarnya memiliki persamaan cita-cita. Salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan di dunia. Namun, ada hal yang lebih progresif yang dicantumkan di dalam SDGs yang ingin dicapai pada tahun 2030 mendatang.

Ada delapan poin di dalam MDGs itu yang penting untuk dicermati, yakni:

1. menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
2. mencapai pendidikan dasar untuk semua;
3. mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. menurunkan angka kematian anak;
5. meningkatkan kesehatan ibu;
6. memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
7. memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan
8. mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Sementara itu, Ada 17 poin penting di dalam SDGs, yakni terciptanya dunia dengan:

1. tanpa kemiskinan;
2. tanpa kelaparan;
3. kesehatan yang baik dan kesejahteraan;
4. pendidikan berkualitas;
5. kesetaraan gender;
6. air bersih dan sanitasi;
7. energi bersih dan terjangkau;
8. pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak;
9. industri, inovasi, dan infrastruktur;
10. pengurangan kesenjangan;
11. keberlanjutan kota dan komunitas;
12. konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
13. aksi terhadap iklim;
14. kehidupan bawah laut;
15. kehidupan di darat;

16. institusi peradilan yang kuat dan kedamaian; dan
17. kemitraan untuk mencapai tujuan.

Dengan pertimbangan untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), pemerintah memandang perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional .

Berdasarkan pertimbangan tersebut pada 4 Juli 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden, Perpres Nomor. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana disampaikan secara langsung oleh Presiden dalam kesempatan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di *Hamburg Messe Und Congress*, Jerman (7 Juli 2017).

Perpres tersebut dimaksudkan sebagai tindak lanjut kesepakatan dalam *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* guna mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, mempromosikan pendidikan, dan memerangi perubahan iklim. Perpres ini menetapkan 17 *goals* dan 169 target dan selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan selanjutnya dijabarkan dalam peta jalan, Rencana Aksi Nasional (RAN), dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan. Adapun sasaran SDG's tahun 2017 sampai dengan 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres ini.

SDG's yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global 2016 sampai 2030 bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sasaran nasional SDG's digunakan sebagai pedoman bagi: 1. Kementerian/Lembaga dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAN SDG's sesuai dengan bidang tugasnya; dan 2. Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD SDG's.

Selain itu, sebagai acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi SDG's. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun dan menetapkan Peta Jalan Nasional SDG's dan RAN SDG's termasuk mengoordinasikan, fasilitasi, serta pendampingan RAN SDG's 5 (lima) tahunan, monitoring dan evaluasi, pelaporan pencapaian SDG's tingkat nasional dan daerah, sumber pendanaan.

Dalam rangka percepatan tujuan TPB, dibentuk Tim Koordinasi Nasional yang terdiri atas Dewan Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar. Dewan Pengarah diketuai oleh Presiden dengan susunan sebagai berikut: Wakil Presiden (Wakil Ketua); Menko Perekonomian (Wakil Ketua I); Menko PMK (Wakil Ketua II); Menko Kemaritiman (Wakil Ketua III); Menko Polhukam (Wakil Ketua IV), dengan Anggota: Menteri PPN/Kepala Bappenas (merangkap Koordinator Pelaksana), Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan.

Selanjutnya, dalam mencapai sasaran SDG's Daerah, Gubernur menyusun RAD SDG's 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayah masing-masing. Sasaran dan Indikator SDG's Nasional dapat dilakukan kaji ulang (dikoordinasikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas) berdasarkan evaluasi dan rekomendasi Dewan Pengarah atas masukan dari Tim Pelaksana dan/atau pertimbangan Tim Pakar.

Indonesia bersama dengan negara-negara lain di dunia hanya memiliki waktu selama 15 tahun sejak tahun 2015 untuk bisa mencapai manifesto SDGs. Artinya, Indonesia membutuhkan tiga (tiga) kali pemilihan presiden (pilpres) untuk dapat mewujudkannya. Agenda yang disahkan oleh PBB di New York ini memiliki 17 tujuan yang terbagi menjadi 169 target untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mewakili Indonesia dalam sidang tersebut mengungkapkan bahwa Indonesia akan mengadopsi SDGs dalam Nawa Cita setelah program MDGs berakhir pada tahun 2015 (Elshintia, 2016).

Masih banyak tantangan-tanganan di bawah pelaksanaan SDGs yang merupakan kelanjutan dari program MDGs tersebut. Douglas Broderick, *the UN Secretary-General's designated representative* untuk Indonesia, mencatat bahwa garis kemiskinan kita masih di sekitar 11%; malnutrisi kronis berada di angka 37.3%; ada 658 ribu jiwa yang merupakan penderita HIV/AIDS, rata-rata pendidikan hanya berlangsung 7.5 tahun (dari program Pemerintah sembilan tahun); kesempatan pendidikan dan penciptaan lapangan kerja yang cukup. Selain itu dampak pada lingkungan hidup juga sangat penting bagi Indonesia, yaitu terjadinya deforestasi (penggundulan hutan) sebesar 1-2% per tahun.

Fokus pelaksanaan SDGs dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, menjadi penting untuk diperhatikan. Idealnya, implementasi SDG's ini diaktualisasikan hingga di setiap desa ada rencana pelaksanaannya. Menjawab pertanyaan kesiapan Indonesia untuk implementasi SDGs, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia menyatakan bahwa semuanya kembali kepada keterlibatan orang Indonesia sendiri, dari Presiden Indonesia, hingga anak-anak di desa.

PBB melalui tujuan pembangunan berkelanjutan dan target-target yang terkandung di dalamnya memberikan petunjuk serta indikator-indikator yang dapat diikuti, khususnya terkait soal-soal lingkungan hidup dan pendidikan. Dalah hasil evaluasi MDG's, Indonesia dianggap punya

peluang untuk sukses dalam implementasi SDG's dimana Indonesia memiliki penduduk kelas menengah yang signifikan dengan 122 juta jiwa dan ekonomi yang menggerakkan 1-2 triliun dolar AS. Artinya, Indonesia potensial mampu melaksanakannya.

Tentu banyak sekali pekerjaan yang perlu dilakukan bersama dalam 15 tahun ke depan ini. Indonesia telah mencapai penurunan angka kemiskinan dari angka sekitar 15 persen sekitar 20 -30 tahun lalu menjadi 11.7 persen saat ini. Dengan rekam jejak yang baik dalam pelaksanaan MDGs, Kepala Bappenas cukup yakin, dengan kebijakan publik yang baik serta pendanaan dan fokus pada SDGs di bidang kesehatan dan pendidikan, maka Indonesia dapat memobilisasi kerjasama dengan mitra-mitranya dan memberikan hasil positif di semua wilayah-wilayah Indonesia pada tahun 2030 nanti.

D. Deskripsi Pemerintahan Daerah (Kabupaten Bekasi)

Kabupaten Bekasi resmi berdiri sejak tanggal 15 agustus 1950 sejak diterbitkannya Undang-Undang No.14 Tahun 1950. Diperkuat dengan Perda no.33 tahun 2001. Kabupaten Bekasi telah berusia 65 tahun pada tahun 2015 (1950 - 2015). Banyak perubahan yang telah terjadi dari masa ke masa. Kabupaten Bekasi mengalami enam jaman seperti yang tergambar di bagian bawah lambang Kabupaten Bekasi dari Lambang (Perisai) digambarkan sebagai laut biru dengan enam buah gelombang laut yang melambangkan enam jaman yang dialami kabupaten bekasi yaitu:

1. Zaman Pemerintah Tarumanegara/Punawarman (zaman hindu-budha)
2. Zaman Pemerintah Negara Pajajaran
3. Zaman Pemerintah Jayakarta, Jakarta
4. Masa Penjajahan Belanda (termasuk masa tanah-tanah partikelir)
5. Zaman Penjajahan Pendudukan Jepang
6. Masa kemerdekaan.

Menelusuri jejak sejarah Kabupaten Bekasi terungkap dalam rangkaian periodisasi kesejahteraan sebagai berikut:

1. Masa Kerajaan
2. Masa Penjajahan Belanda
3. Masa Pendudukan Jepang
4. Masa Persiapan Kemerdekaan
5. Masa Terbentuknya Kabupaten Bekasi
6. Masa Pemberontakan PKI
7. Masa Pembangunan

Batas Administrasi dan Letak Geografis

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terletak di sebelah Timur DKI Jakarta yang merupakan pintu gerbang dari Ibu kota Negara (Jakarta), juga sebagai salah satu penyangga (*hinterland*) Ibu kota Negara Republik Indonesia.

Secara geografis wilayah Kabupaten Bekasi terletak pada koordinat $106^{\circ} 48' 28''$ - $107^{\circ} 27' 29''$ BT dan $6^{\circ} 10' 53''$ - $6^{\circ} 30' 6''$ LS dengan topografi daratan rendah dan daratan bergelombang. Daratan rendah meliputi sebagian Utara sedangkan daratan bergelombang terdapat di bagian Selatan. Ketinggian lokasi antara 6 - 115 meter dpl dan kemiringan 0° - 25° . Suhu udara yang terjadi di Kabupaten Bekasi berkisar antara 28° - 32° C. Curah hujan tertinggi dari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari.

Wilayah Kabupaten Bekasi terbagi kedalam 23 kecamatan yang meliputi 6kelurahan dan 182 desa serta memiliki empat wilayah perbatasan:

- Batas Utara : Laut jawa
- Batas Selatan : Kabupaten Bogor
- Batas Timur : Kabupaten Karawang
- Batas Barat : Kota Bekasi, DKI Jakarta

Luas wilayah: 127.388 Ha. Kecamatan Yang paling luas yaitu Kecamatan Muara gembong (14.009 Ha) atau 11% dari luas Kabupaten.

Visi Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2017 – 2022:

***“TERWUJUDNYA KABUPATEN BEKASI BERSINAR
(BERDAYA SAING, SEJAHTERA, INDAH DAN RAMAH
LINGKUNGAN TAHUN 2022)”***

Visi tersebut di atas mengandung pengertian sebagai berikut:

- 1. Berdaya Saing;** Kondisi daerah dan masyarakat Kabupaten Bekasi yang memiliki keunggulan komparatif baik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru maupun kualitas SDM yang mampu menjawab berbagai tantangan regional maupun global
- 2. Sejahtera;** Kondisi Kabupaten Bekasi yang mampu menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat dan aman. Terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar masyarakat serta kemudahan bagi masyarakat dalam berkarya dan mengaktualisasikan diri
- 3. Indah;** Kondisi lingkungan dan tata kelola Kabupaten Bekasi yang nyaman dan indah sebagai citra diri Kabupaten Bekasi yang maju dan modern
- 4. Ramah Lingkungan;** Pelaksanaan pembangunan senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan serta prinsip keberlanjutan untuk menjamin kelestarian sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan untuk generasi mendatang.

Adapun Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi adalah:

1. Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang responsif, professional, transparan dan akuntabel,
2. Memantapkan pembangunan SDM yang berkualitas,
3. Memantapkan perekonomian daerah melalui penguatan sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pariwisata,
4. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi,

5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemantapan penyediaan kebutuhan dasar yang layak,
6. Mewujudkan penataan ruang dan pembangunan infrastruktur terpadu,
7. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang agamis melalui pengembangan nilai-nilai budaya lokal,
8. Mewujudkan Kabupaten Bekasi yang nyaman, tentram, dan asri
9. Mewujudkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

BAB IV

KESETARAAN GENDER; REALITA DAN IMPLIKASINYA

Seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan millennium atau MDG's yang kemudian sekarang berganti menjadi SDG's maka salah satu upaya mengukur keberhasilan itu adalah dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta menghindari kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam mendapat manfaat pembangunan dengan menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pembangunan yang berorientasi pada isu gender akan melahirkan keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang-bidang kesejahteraan lainnya.

Asumsi seperti yang ada pada mukamidah di atas dilandasi pada kenyataan empiris yang menunjukkan bahwa pembangunan bersifat netral gender sering kali tidak memperhitungkan adanya perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan akan berdampak pada pembangunan yang salah sasaran atau kurang efektif. Oleh karena itu, proses pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender harus dimulai dari tahapan pembangunan mulai dari proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dengan melibatkan peran serta yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagai pelaku subyek pembangunan.



Untuk mencapai pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender perlu diupayakan peningkatan peran serta perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan. Hal itu pun tengah dilakukan oleh pemerintah di daerah Kabupaten Bekasi, dimulai dengan membuat gambaran yang tepat terhadap keadaan pembangunan yang berbasis pada gender, untuk mengevaluasi apakah pembangunan tersebut sudah tepat sasaran.

Proses pembangunan yang berbasis gender dilakukan dengan menggunakan strategi yang disebut Pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu sebagai strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan Negara) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Langkah-langkah untuk membangun strategi dalam PUG adalah salah satu dengan membuat data dan analisis dalam gambaran statistik yang kemudian diuraikan dalam bentuk laporan. Gambaran statistik disajikan dengan model data terpilah berdasarkan gender yang nantinya dianalisis dengan menggambarkan ada atau tidak ketimpangan terakhir memunculkan isu-isu strategis yang harus dikembangkan dalam proses pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi.

Penyajian data terpilah tersebut harus didasari dengan data-data mentah sekunder yang juga sudah dipilah sehingga data tersebut dapat mencerminkan gambaran statistik. Proses ini dibutuhkan pemahaman pentingnya data terpilah gender bagi pembuat data pelaksanaan kebijakan, sehingga memudahkan penulisan statistik dan analisisnya. Selain itu pula untuk memberikan gambaran yang tepat tentang penyusunan buku ini, maka ditentukan aspek-aspek pembangunan yang ditampilkan sebagai isu penting yang dimungkinkan dapat menjadi sasaran pembangunan yang lebih tepat. Adapun aspek-aspek pem-

bangunan yang sering diketengahkan dalam pembangunan gender antara lain, isu kesehatan, isu pendidikan, isu ketenagakerjaan, isu politik, isu kewirausahaan, dan perdagangan, isu kependudukan, isu kekerasan terhadap perempuan dan penanganannya.

Realita dan tantangan keadilan gender dan kesetaraan gender akan menggunakan data dari salah satu daerah yang dipilih dengan menggunakan *purposive sampling*. Pemilihan Kabupaten Bekasi sebagai objek analisis mempertimbangkan banyak faktor. Faktor demografi, keadaan sosial kemasyarakatan, aksesibilitas menjadi alasan pemilihan. Berikut beberapa hal aspek yang akan diuraikan di dalam setiap sub-topik

A. Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender

Perkembangan penduduk di Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan yang cukup pesat seiring dengan pertumbuhan industri perdagangan dan perumahan, yang menyebabkan sebagian besar penduduk dari luar Kabupaten Bekasi mencari pekerjaan dan hidup menetap di wilayah ini. Jumlah berdasarkan gender akan melihat kecenderungan harapan hidup antara perempuan dengan laki-laki, serta sejauh mana program pembangunan berkaitan dengan kependudukan dan pengelola manfaat pembangunan terhadap gender menjadi lebih mudah dibandingkan data netral.

Berdasarkan perhitungan BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2016 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bekasi berjumlah 3.371.691 jiwa sehingga rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2.357 jiwa per km². Adapun jumlah penduduk berdasarkan gender adalah laki-laki 1.717.738 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1.653.908 jiwa (tabel 4.1)

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender Di Kabupaten Bekasi

Tahun	2016	2015	2014
Jumlah Pria (jiwa)	1.717.783	1.592.588	1.531.814
Persen	50.95%	51.10%	51.35%

Jumlah Wanita (jiwa)	1.653.908	1.530.110	1.470.298
Persen	49.05%	48.90%	48.65%
Jumlah total	3.371.691	3.122.698	3.022.112

Sumber: Jawa Barat dalam angka 2016 BPS Prov.Jabar

Bila dikaitkan dengan gender, maka jumlah penduduk pria lebih besar setiap tahunnya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Adapun besaran perbandingannya adalah antara 2,44% pada tahun 2012, kemudian turun menjadi sebesar 2,4% pada tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2014 perbedaannya meningkat menjadi 2,7%. Dan pada tahun 2015 selisihnya 2,1% yang artinya terjadi fluktuasi perbandingan yang tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Adapun proyeksi pada tahun berikutnya yaitu 2017, maka peningkatan jumlah penduduk diperkirakan masih berkisar seperti itu (proyeksi dilakukan karena angka resmi dari BPS Kab.Bekasi 2017 Belum dirilis).

Berikut ini disajikan tabel yang menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan gender dan per Kecamatan di Kabupaten Bekasi.

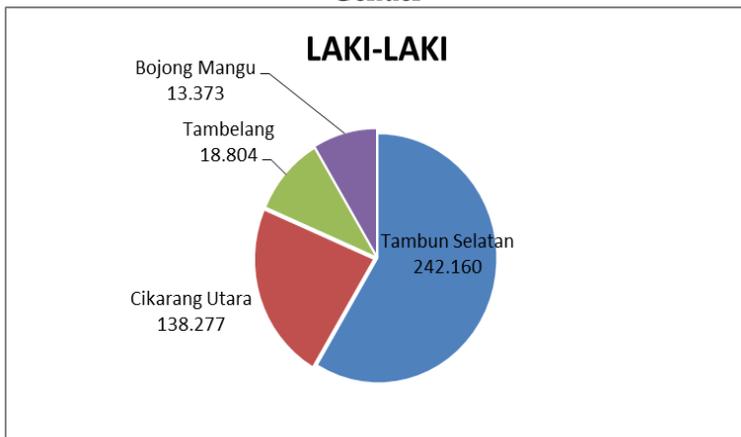
Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Gender Di Kabupaten Bekasi Tahun 2017

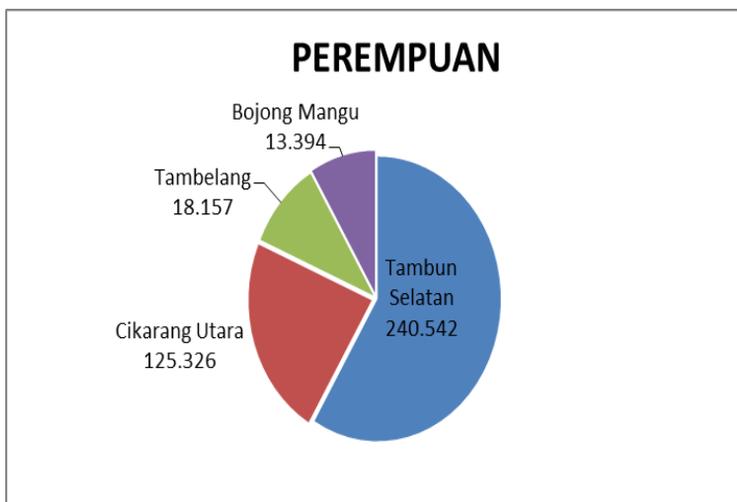
No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Setu	72.680	70.704	143.384
2	Serang Baru	84.290	83.748	168.038
3	Cikarang Pusat	50.070	49.376	99.446
4	Cikarang Selatan	144.466	131.315	275.781
5	Cibarusah	44.862	44.668	89.530
6	Bojongmangu	13.373	13.394	26.767
7	Cikarang Timur	52.066	50.513	102.579
8	Kedungwaringin	32.288	29.175	61.463
9	Cikarang Utara	138.277	125.326	263.603
10	Karangbahagia	48.723	46.737	95.359

11	Cibitung	131.863	130.505	262.368
12	Cikarang Barat	135.766	126.278	262.044
13	Tambun Selatan	242.160	240.542	482.702
14	Tambun utara	105.082	105.085	210.167
15	Babelan	141.652	141.899	283.551
16	Tarumajaya	78.515	74.979	153.494
17	Tambelang	18.804	18.157	36.961
18	Sukawangi	24.662	23.367	48.029
19	Sukatani	38.546	35.440	73.986
20	Sukakarya	23.384	21.900	45.284
21	Pebayuran	52.082	48.389	100.471
22	Cabangbungin	24.588	23.941	48.529
23	Muaragembong	19.584	18.571	38.155
Jumlah total		1.717.783	1.653.908	3.371.691

Sumber: diolah dari jabarprov.go.id, diakses pada tanggal 15 November 2017

Gambar 4.1
Jumlah Penduduk Terpadat Dan Terkecil Ditinjau dari Gender





Berdasarkan data yang terhimpun dalam Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi 2016 digambarkan bahwa jumlah penduduk terpadat terdapat pada kecamatan Tambun Selatan yaitu 482.702 jiwa di tahun 2017 dan di Kecamatan Cikarang Utara yaitu sebesar 263.603 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Bojongmangu 26.767 jiwa dan yang terendah kedua adalah Tambelang yaitu 36.961 jiwa. Pada umumnya wilayah yang padat penduduknya tersebut merupakan pusat dari pertumbuhan ekonomi yang berbasis industri dan sektor jasa, sehingga melatar belakangi adanya perpindahan penduduk dari luar daerah maupun urbanisasi.

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa jumlah perempuan di setiap kecamatan cenderung sedikit lebih rendah dibandingkan dengan jumlah laki-laki yaitu 49.05% dari total jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa mitos penduduk perempuan lebih banyak berdasarkan data di atas tidak terjadi ataupun belum terjadi setidaknya di Kabupaten Bekasi hingga tahun 2017.

Bila melihat pertumbuhan penduduk di kabupaten Bekasi menunjukkan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten

Bekasi adalah dengan membatasi jumlah kelahiran bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Demikian pula peningkatan pelayanan pengetahuan ber KB menjadi agenda prioritas pemerintah daerah di Kabupaten Bekasi.

B. Pendidikan dalam statistik gender

Sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bekasi, maka pemerintah Kabupaten Bekasi telah menetapkan anggaran 20% lebih dalam APBD untuk tahun 2017 ini, meskipun ada sedikit pemangkasan APBD, namun anggaran tersebut dirasakan mencukupi untuk peningkatan pendidikan di Kabupaten Bekasi. Dalam dana alokasi khususnya saja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mendapatkan anggaran sebesar Rp. 97 miliar. Jumlah tersebut akan bertambah kembali sebesar Rp. 32 Miliar setelah APBD perubahan 2017 Provinsi Jawa Barat disahkan¹⁶.

Namun demikian masih banyak yang perlu ditingkatkan kaitannya dengan kebutuhan pendidikan di Kabupaten Bekasi, mengingat wilayahnya yang cukup luas maka dana penyerapan pendidikan benar-benar harus digunakan secara efisien dan efektif, agar tidak terjadi penyalahgunaan keuangan atau kebijakan yang kurang tepat sasaran.

Demikian juga isu pendidikan dan gender juga harus diperhatikan, mengingat kesempatan pendidikan di Kabupaten Bekasi, terutama di wilayah terpinggir di Kabupaten Bekasi masih jauh dari harapan. Pada persoalan kesempatan pendidikan, perempuan lebih rendah untuk mendapatkan pendidikan sampai tingkat SMA sederajat, apalagi pendidikan tinggi. Persoalan ini umumnya selain karena faktor ekonomi juga pengaruh budaya sosial yang melekat dimasyarakat yaitu perempuan selain pengembang tugas domestik namun juga harus bekerja disektor publik dengan keahlian rendah seperti tenaga buruh, pekerja rumah tangga, pedagang informal, dan penjual jasa.

¹⁶ <http://www.gobekasi.com/index.php/detail/5346/dak-pendidikan-capai-rp114miliar#.Uklb9sfH50s>, diakses tanggal 1 desember 2017

Berikut ini untuk mengetahui perkembangan pendidikan di Kabupaten Bekasi, maka berikut ini data-data statistik gender yang disajikan merupakan gambaran tentang tenaga pendidik yaitu jumlah kepala sekolah, jumlah guru sebagai tenaga pelaksana dalam peningkatan pendidikan di Kabupaten Bekasi.

Keikutsertaan perempuan dan laki-laki dalam sektor pendidikan merupakan salah satu faktor yang turut andil dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Tenaga pendidik yang didominasi oleh salah satu gender saja, menunjukkan bahwa, pekerjaan mendidik masih ditujukan pada salah satu jenis kelamin saja. Namun, jika ada perimbangan antara keduanya, akan lebih bervariasi seperti pola didik rumah tangga yang di dalamnya terdapat ibu dan ayah yang saling mengimbangi dalam memberikan pengaruh sifat, watak, dan karakter anak.

Seperti domain bahwa guru taman kanak-kanan adalah khusus untuk perempuan dengan asumsi bahwa wanita lebih memiliki *sense* kasih sayang kepada anak usia dini, anak-anak masih butuh dekapan lembut. Data dari <http://manajemen.paud-dikmas.kemendikbud.go.id/> yang kami akses pada tanggal 8 September 2017 menunjukkan bahwa 100% guru TK di Kabupaten Bekasi adalah perempuan.

Tabel 4.3
Jumlah TK Dan Sederajat Berdasarkan Gender Pada Setiap Kecamatan Di Kabupaten Bekasi

No	Nama Kecamatan	Sekolah	Guru
1	2	3	4
1	Cibarusah	20	65
2	Cikarang Utara	50	273
3	Pebayuran	7	22
4	Muara gembong	1	3
5	Tambun Selatan	126	474
6	Kedung waringin	2	6
7	Tambun Utara	47	125

8	Bojong Mangu	-	-
9	Cikarang Pusat	21	81
10	Babelan	76	284
11	Karang Bahagia	16	82
12	Sukakarya	2	1
13	Tambelang	5	9
14	Cabang Bungin	6	15
15	Sukatani	14	19
16	Setu	36	140
17	Serang Baru	25	123
18	Cikarang Selatan	46	162
19	Cikarang Timur	12	73
20	Cibitung	58	212
21	Cikarang Barat	30	87
22	Tarumajaya	39	140
23	Sukawangi	1	7
Jumlah Total		640	2403

Sumber: Profil Data Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016

Persepsi yang kemudian di banyak daerah bukan hanya di Kabupaten tapi sudah menjadi persepsi nasional yang kini menjadi realita yang sangat bias gender. Persepsi bahwa guru TK harus perempuan keliru. Sebab, guru laki-laki pun punya kasih sayang, bahkan kadang bisa lebih dari pada wanita. Dan tidak ada jaminan bahwa setiap guru wanita itu pun punya kasih sayang yang lebih dari guru laki-laki.

Namun, jika ada perimbangan antara keduanya, akan lebih bervariasi seperti pola didik rumah tangga yang didalamnya terdapat ibu dan ayah yang saling mengimbangi dalam memberikan pengaruh sifat, watak, dan karakter anak, berdasarkan tabel dibawah ini menunjukkan jumlah guru perempuan lebih banyak di kabupaten Bekasi khususnya di wilayah Tambun Selatan, Kedung Waringin dan Cikarang Utara. Ketiga wilayah ini merupakan wilayah yang padat dengan penduduk. Jumlah guru perempuan lebih banyak di

pusat-pusat kota dibandingkan di wilayah yang memiliki jarak yang jauh, seperti Babelan, Sukakarya Dan Tambelang. Untuk lebih jelasnya berikut tabel yang menunjukkan gambaran tersebut.

Tabel 4.4
Jumlah Guru SD, SMP, SMA/SMK Dan Sederajat
Berdasarkan Gender Pada Setiap Kecamatan Di Kabupaten
Bekasi

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Cibarusah	452	404	856
2	Cikarang Utara	1.036	1.204	2240
3	Pebayuran	397	423	820
4	Muara gembong	151	243	394
5	Tambun Selatan	2.015	2.157	4172
6	Kedung waringin	232	277	509
7	Tambun Utara	548	653	1201
8	Bojong Mangu	102	113	215
9	Cikarang Pusat	253	304	557
10	Babelan	892	929	1821
11	Karang Bahagia	206	441	647
12	Sukakarya	206	244	450
13	Tambelang	109	253	362
14	Cabang Bungin	224	294	518
15	Sukatani	304	445	749
16	Setu	375	590	965
17	Serang Baru	338	508	846
18	Cikarang Selatan	579	758	1337
19	Cikarang Timur	260	390	650
20	Cibitung	572	653	1225
21	Cikarang Barat	598	1044	1642
22	Tarumajaya	376	561	937
23	Sukawangi	194	249	443
	Jumlah Total	10.419	13.137	23556

Sumber: Data dari Dinas Pendidikan kabupaten bekasi yang telah diolah tahun 2017

Data di atas menunjukkan dan bahwa dalam dunia pendidikan selain pada pendidikan di Taman Kanak-kanak, rasio perbandingan jumlah guru laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh. Kalau pada tingkat guru TK didominasi oleh guru perempuan, pada kategori ini lebih cenderung hampir sama rasionya. Bahkan pada tingkatan SMK rasio jumlah guru laki-laki lebih besar dari guru perempuan.

Peningkatan kualitas pendidikan tidak lepas dari pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dalam upaya menciptakan pendidikan yang bermutu dan inovatif dalam mengelola pendidikan. Oleh karena itu, peran kepala sekolah sangat menentukan dalam membuat kebijakan dan keputusan mengenai pengembangan pendidik baik kepada guru maupun muridnya. Isu gender dalam pendidikan berkaitan dengan kepala sekolah berkenaan dengan kemampuan kepala sekolah untuk menterjemahkan pengarusutamaan gender dalam membuat kebijakan maupun dalam pengelolaan pendidikan maupun proses pengajaran. Asumsi yang muncul adalah apabila kepala sekolah berlatar belakang perempuan akan lebih peka terhadap hal itu. Berikut ini tabel yang menjelaskan jumlah kepala sekolah dari sudut gender.

Tabel 4.5
Jumlah Kepala Sekolah Di Tingkat SD, SMP, SMA Dan SMK Dan Sederajat Pada Setiap Kecamatan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2016

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Cibarusah	43	29	72
2	Cikarang Utara	94	63	157
3	Pebayuran	50	34	84
4	Muara gembong	32	22	54
5	Tambun Selatan	130	108	238
6	Kedung waringin	29	20	49
7	Tambun Utara	43	30	73
8	Bojong Mangu	15	11	26

9	Cikarang Pusat	25	17	42
10	Babelan	96	64	160
11	Karang Bahagia	36	24	60
12	Sukakarya	35	19	54
13	Tambelang	23	13	36
14	Cabang Bungin	40	23	63
15	Sukatani	54	30	84
16	Setu	65	36	101
17	Serang Baru	47	26	73
18	Cikarang Selatan	55	30	85
19	Cikarang Timur	50	10	60
20	Cibitung	54	30	84
21	Cikarang Barat	72	39	111
22	Tarumajaya	65	36	101
23	Sukawangi	33	18	51
Jumlah Total		1187	731	1918

Sumber: Data dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi yang telah diolah tahun 2016

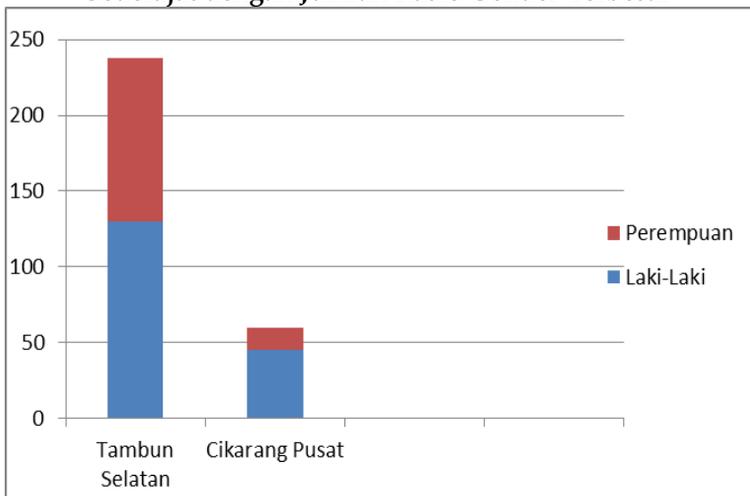
Kepala sekolah dianggap sebagai orang yang memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Pengaruh kepala sekolah cukup signifikan dalam memberikan input kepada pemerintah khususnya Dinas Pendidikan setempat. Oleh karena itu, kepala sekolah adalah orang yang dianggap cukup menguasai seputar permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan yang terkait dengan masalah pendidikan. Kewenangan dalam memberikan kesempatan yang sama untuk masyarakat agar bisa berkembang di dunia pendidikan juga dipengaruhi oleh kepala sekolah. Untuk melihat pengaruh partisipasi angka sekolah siswa, juga dapat diukur jumlah penentu kebijakan yang imbang antara laki-laki dan perempuan.

Jika kita lihat pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa stigma yang berkembang untuk menjadi kepala sekolah masih didominasi laki-laki yakni 1187 orang kepala sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi, sementara perempuan hanya

731 Orang. Berdasarkan data distribusi tersebut diketahui bahwa rasio kepala sekolah berdasarkan sudut pandang gender dengan rata-rata rasio 65% : 35%. Dimana dari total 1918 jumlah kepala sekolah yang terakumulasi pada sekolah negeri dan swasta mulai dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK sederajat yang tersebar di 23 kecamatan.

Dimana komposisi kepala sekolah masih didominasi oleh kaum laki-laki dengan jumlah 1187 orang (65%) sedangkan kepala sekolah berjenis kelamin perempuan sebanyak 731 (35%). Perlu telaah lebih dalam mengenai data statistik di atas. Sejumlah faktor mulai dari syarat administrasi, kompetensi, jenjang pendidikan hingga faktor sosio-ekonomi menjadikan proporsi yang cukup signifikan tersebut bisa terjadi.

Gambar 4.2
Jumlah Kepala Sekolah di Tingkat SD, SMP, SMA-SMK dan Sederajat dengan Jumlah Rasio Gender Terbesar



Sedangkan berdasarkan gambar grafik di atas Nampak ada fenomena yang sangat menarik adalah di wilayah kecamatan Tambun Selatan, rasio kepala sekolah laki-laki dan perempuan tidak sama seperti 22 kecamatan lainnya yang masih di dominasi oleh laki-laki. Di daerah tersebut justru kepala sekolah perempuan hampir menyamai dengan laki-laki

dengan rasio gender 55% : 45%. Jumlah kepala sekolah laki-laki sebanyak 130 orang, sedangkan kepala sekolah perempuan sebanyak 108 orang. Sementara di kecamatan Cikarang Timur sendiri, rasio kepala sekolah laki-laki dan perempuan justru kebalikan dari kecamatan Tambun Selatan, kepala sekolah perempuan hanya ada 10 orang sedangkan kepala sekolah laki-laki 50 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan di ranah kepemimpinan di lingkup pendidikan, masih menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

Dari 23 kecamatan se-Kabupaten Bekasi secara gambaran umum berdasarkan rasio gender terhadap kepala sekolah. Ditemukan data bahwa *rasio average* dari perbandingan kepala sekolah laki-laki dan perempuan adalah 65% : 35%. Namun terdapat 2 kecamatan yaitu Tambun Selatan memiliki rasio 55%: 45%. Berarti rasio hampir sama. Sedangkan di Kecamatan Cikarang Timur terjadi *emerge rasio average* dengan rasio 83% : 17% dimana kepala sekolah perempuan hanya berjumlah 10 orang dan kepala sekolah memiliki jumlah yang sangat besar yaitu 50 orang.

C. Kesehatan dalam Statistik Gender

Salah satu aspek pemberdayaan perempuan adalah mengenai kualitas kesehatan perempuan. Berdasarkan periode tahun 2000-2010, penduduk perempuan usia 15-49 tahun di wilayah Kabupaten Bekasi dari 2000 sampai 2010, di perkirakan jumlahnya akan terus meningkat. Pada tahun 2000, jumlah penduduk perempuan usia 15-49 tahun sebesar 496.295 jiwa meningkat menjadi 672.214 jiwa pada tahun 2010 dan terus meningkat dengan pesat menjadi 901.072 di tahun 2013. Peningkatan jumlah penduduk perempuan di usia reproduksi (15-49 tahun) mengindikasikan perlunya persiapan pemerintah Kabupaten Bekasi dalam pelayanan kesehatan terutama kesehatan perempuan terutama seputar kesehatan reproduksi mereka. Selain kesehatan reproduksi, pelayanan Keluarga Berencana (KB) juga perlu mendapat perhatian agar jumlah

kelahiran tetap dapat dikendalikan. Dalam memfasilitasi kesehatan masyarakat, selain usaha dari pemerintah Kabupaten Bekasi juga perlu adanya kerjasama dengan pihak swasta¹⁷.

Untuk meningkatkan pelayanan maka disetiap kecamatan dan desa telah didirikan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan terdapat sejumlah pegawai unit pelaksana teknis yang bertugas melayani masyarakat. Adapun tenaga UPT berdasarkan gender dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6
Pegawai UPT Di Puskesmas Berdasarkan Gender Per-
Kecamatan Di Kabupaten Bekasi 2016

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Cibarusah	10	6	16
2	Cikarang Utara	8	7	15
3	Pebayuran	4	8	12
4	Muara gembong	5	3	8
5	Tambun Selatan	14	22	36
6	Kedung waringin	5	8	13
7	Tambun Utara	10	19	19
8	Bojong Mangu	4	8	12
9	Cikarang Pusat	4	8	12
10	Babelan	5	9	14
11	Karang Bahagia	6	8	14
12	Sukakarya	6	7	13
13	Tambelang	6	9	15
14	Cabang Bungin	5	8	13
15	Sukatani	4	7	11
16	Setu	5	9	14
17	Serang Baru	6	9	15
18	Cikarang Selatan	6	10	16
19	Cikarang Timur	7	9	16
20	Cibitung	4	10	14

¹⁷ Lembar daerah; Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi 2005-2025

21	Cikarang Barat	5	12	17
22	Tarumajaya	6	9	15
23	Sukawangi	5	9	14
Jumlah Total		140	214	344

Sumber: Data dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi yang telah diolah tahun 2016

Jika melihat tabel diatas, Nampak bahwa pegawai UPT Puskesmas di Kabupaten Bekasi sebanyak 344 orang yang tercatat dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah tenaga UPT di puskesmas didominasi oleh perempuan yang umumnya bekerja sebagai perawat dan bidan. Jumlah perempuan memang lebih banyak mengingat sebagian besar pelayanan ditujukan kepada pasien perempuan dimana bila dilihat jumlah pengguna pelayanan kesehatan lebih banyak dari kelompok perempuan dan anak jika dibandingkan dengan laki-laki.

Selain tenaga kesehatan terdapat juga sejumlah dokter puskesmas yang menjalani tugas pengobatan di setiap kecamatan dan desa. Berikut ini tabel yang menunjukkan jumlah tenaga medis tersebut di setiap kecamatan.

Tabel 4.7
**Jumlah Dokter Puskesmas Berdasarkan Gender Per-
Kecamatan di Kabupaten Bekasi tahun 2016**

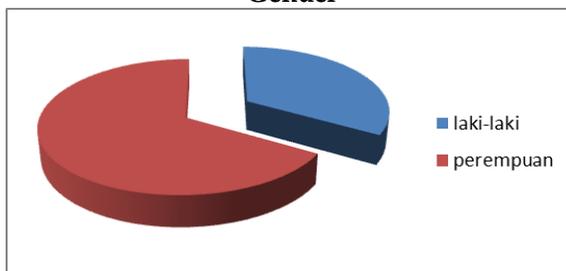
No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Cibarusah	2	3	5
2	Cikarang Utara	2	3	5
3	Pebayuran	1	1	2
4	Muara gembong	1	1	2
5	Tambun Selatan	3	5	8
6	Kedung waringin	1	2	3
7	Tambun Utara	0	2	2
8	Bojong Mangu	2	1	3
9	Cikarang Pusat	0	3	3
10	Babelan	2	2	4

11	Karang Bahagia	1	2	3
12	Sukakarya	1	0	1
13	Tambelang	0	2	2
14	Cabang Bungin	2	2	4
15	Sukatani	2	1	2
16	Setu	1	4	5
17	Serang Baru	0	2	2
18	Cikarang Selatan	1	2	3
19	Cikarang Timur	2	6	8
20	Cibitung	1	3	4
21	Cikarang Barat	2	7	9
22	Tarumajaya	1	3	4
23	Sukawangi	1	1	2
Jumlah Total		29	58	86

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa jumlah tenaga dokter perempuan di puskesmas memiliki jumlah lebih banyak yaitu 58 dokter dari 86 orang jumlah dokter yang tersedia sama halnya dengan tenaga kesehatan, dominannya jumlah dokter perempuan lebih banyak disebabkan penggunaan layanan puskesmas lebih banyak dari kalangan ibu-ibu dan anak, seperti pemeriksaan kehamilan, melahirkan hingga pelayanan gizi balita dan anak.

Demikian juga tenaga perawat kesehatan lebih banyak di dominasi perempuan, sebagaimana terlihat pada gambar dan tabel berikut ini

Gambar 4.3
Presentase Jumlah Perawat Di Puskesmas Ditinjau Dari Gender



Tabel 4.8
Jumlah Tenaga Perawat Puskesmas Berdasarkan Gender

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Cibarusah	4	9	13
2	Cikarang Utara	3	12	15
3	Pebayuran	3	6	9
4	Muara gembong	6	6	12
5	Tambun Selatan	2	9	11
6	Kedung waringin	4	4	8
7	Tambun Utara	4	11	15
8	Bojong Mangu	4	2	6
9	Cikarang Pusat	3	3	6
10	Babelan	3	11	14
11	Karang Bahagia	9	4	13
12	Sukakarya	7	6	13
13	Tambelang	3	4	7
14	Cabang Bungin	7	1	8
15	Sukatani	5	15	20
16	Setu	2	6	9
17	Serang Baru	4	5	9
18	Cikarang Selatan	0	10	10
19	Cikarang Timur	4	16	20
20	Cibitung	3	12	15
21	Cikarang Barat	4	10	14
22	Tarumajaya	1	9	10
23	Sukawangi	5	14	19
Jumlah Total		87	173	338

Sumber: Data dari seluruh kecamatan di kabupaten bekasi yang telah diolah tahun 2016

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah perawat di puskesmas lebih didominasi perawat perempuan (66,54%) dibandingkan perawat laki-laki (33,46%), hal ini disebabkan pekerjaan perawat (melayani) dianggap sebagai pekerjaan yang lebih identik dengan perempuan. Namun demikian kebutuhan

perawat masih sangat dibutuhkan, karena kebutuhan tenaga perawat dan bidan tidak lepas dari tingginya permintaan atas peningkatan kualitas pelayanan di tingkat desa, terutama pelayanan kepada perempuan hamil, melahirkan, menyusui serta kebutuhan gizi ibu dan anak. Berikut ini gambaran jumlah pengguna pelayanan kesehatan di puskesmas berdasarkan gender:

Tabel 4.9
Jumlah Pengguna Pelayanan Puskesmas Berdasarkan Gender Per Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2016

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Cibarusah	1.562	1.084	2.646
2	Cikarang Utara	1.591	3.375	4.966
3	Pebayuran	16.205	23.126	39.331
4	Muara gembong	1.120	2.750	3.870
5	Tambun Selatan	3.081	2.969	6.050
6	Kedung waringin	16.242	20.184	36.426
7	Tambun Utara	2.466	672	3.138
8	Bojong Mangu	4.007	4.010	8.017
9	Cikarang Pusat	26.682	27.520	54.184
10	Babelan	1.521	2.823	4.344
11	Karang Bahagia	50	150	200
12	Sukakarya	753	1.397	2.150
13	Tambelang	30	50	80
14	Cabang Bungin	1.680	2.520	4.200
15	Sukatani	1.200	15.000	16.200
16	Setu			24.547
17	Serang Baru			25.260
18	Cikarang Selatan	6.543	10.453	16.996
19	Cikarang Timur	19.405	29.470	48.875
20	Cibitung	40.007	58.670	98.677
21	Cikarang Barat	29.267	30.821	60.088

22	Tarumajaya	55.369	63.370	118.639
23	Sukawangi			8.471
Jumlah Total		228.781	300.369	529.177

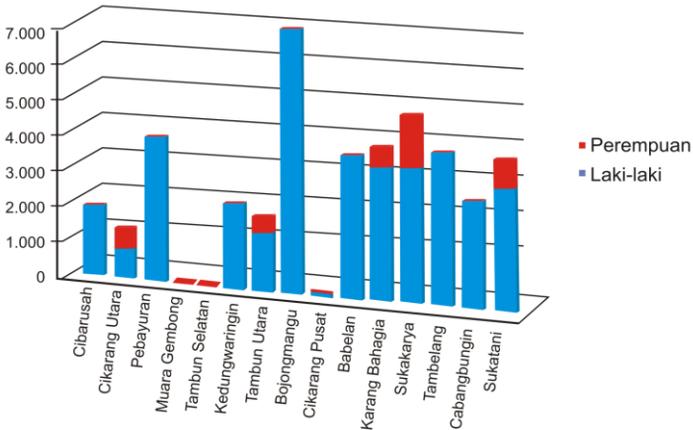
Sumber: Data dari seluruh kecamatan di kabupaten bekasi yang telah diolah tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pengguna layanan kesehatan didominasi oleh perempuan sebanyak 300,396 orang. Hal ini karena kebutuhan pelayanan kesehatan perempuan dan anak lebih tinggi mengingat perempuan dapat hamil, melahirkan, menyusui dan kesehatan anak berkaitan dengan gizi dan perkembangan anak. Beberapa data di puskesmas tidak memiliki rekam data berbasis gender. Oleh karena itu akan lebih baik bila data tersebut disediakan termasuk jenis penyakit yang diderita berdasarkan gender. Hal ini diperlukan untuk membuat perencanaan program kesehatan yang akurat berdasarkan gender dan jenis penyakitnya.

D. Pengelolaan Pertanian dan Peternakan dalam Statistik Gender

Tanah merupakan modal penting dalam pengelolaan pertanian, sehingga kepemilikan tanah seharusnya mendapatkan perlindungan dari pemerintah terutama untuk digunakan oleh petani dalam upaya pengembangannya. Namun banyak kenyataan yang ditemukan bahwa banyak lahan yang dikelola oleh industri dibandingkan lahan milik rumah tangga. Hal ini tentu perlu menjadi sorotan penting bagi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, berkaitan upaya mengamankan jumlah lahan yang diolah dan dimiliki oleh petani, dalam rangka upaya untuk menjaga pertahanan pangan dari krisis. Oleh Karen itu, persoalan ini dapat dikaitkan dengan pemilik lahan berdasar latar belakang jenis kelamin, berikut ini data yang diperoleh berdasarkan penyebaran kuesioner di 23 kecamatan Kabupaten Bekasi.

Gambar 4.4
Jumlah Kepemilikan Lahan Pertanian Berdasarkan Gender
Per Kecamatan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2016



Berdasarkan gambar grafik di atas menunjukkan jumlah perempuan yang mengelola lahan lebih sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki, artinya pemilik lahan lebih banyak dimiliki laki-laki. Dampak dari keadaan ini adalah perempuan yang tidak memiliki lahan akan sulit untuk mengembangkan usaha taninya dan pada umumnya hanya menjadi buruh tani dan sangat tergantung dengan peran laki-laki. Hal ini tentu akan membawa ketimpangan besar, kecuali bila perempuan juga dilibatkan atau mendapatkan akses untuk mendapatkan modal tanah dengan menanam saham atas pemilik dan hasilnya dapat dibagikan berdasarkan hak-haknya.

Selain pemilikan tanah, di beberapa desa yang masih memiliki sumber lahan pertanian yang memadai terdapat banyak tenaga petani atau petani penggarap baik perempuan atau laki-laki. Adapun jumlah petani penggarap di Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Jumlah Petani Penggarap Berdasarkan Gender Per Kecamatan
Di Kabupaten Bekasi Tahun 2016

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Cibarusah	3.374	3.352	6.726
2	Cikarang Utara	40.102	21.593	61.695
3	Pebayuran	3.847	78	3.925
4	Muara gembong	5.280	2.135	.7415
5	Tambun Selatan	1.573	993	2.566
6	Kedung waringin	2.251	-	2.251
7	Tambun Utara	1.401	466	1.867
8	Bojong Mangu	6.843	-	6.843
9	Cikarang Pusat	154	62	216
10	Babelan	2.754	1.092	3.648
11	Karang Bahagia	3.281	365	3.646
12	Sukakarya	4.760	4.281	9.041
13	Tambelang	3.507	-	3.507
14	Cabang Bungin	4.743	7	4.750
15	Sukatani	2.800	500	3.300
16	Setu			5.823
17	Serang Baru			1.334
18	Cikarang Selatan			526
19	Cikarang Timur			3.216
20	Cibitung			785
21	Cikarang Barat	1.657	181	1.838
22	Tarumajaya	1.735	19	1.754
23	Sukawangi			5.947
Jumlah Total		90.062	35.124	135.204

Sumber: Data dari seluruh kecamatan di kabupaten bekasi yang telah diolah tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah petani penggarap di Kabupaten Bekasi memiliki jumlah yang sangat sedikit yaitu 135.204 petani penggarap, karena sebagian penduduk asli mulai berpindah pekerjaan dari petani menjadi buruh atau pekerja informal, mengingat lahan pertanian yang

semakin sempit. Bila dilihat data berdasarkan gender diatas maka tergambar bahwa jumlah petani penggarap pria lebih dominan yaitu sebanyak 90.062 orang sedangkan petani perempuan hanya 35.124 orang, artinya bahwa pekerjaan sebagai petani pada umumnya menjadi pekerjaan laki-laki, sedangkan perempuan yang bekerja sebagai petani hanya bersifat membantu suami atau keluarganya, selain bekerja di sektor rumah tangga.

Selain kepemilikan lahan pertanian, terdapat juga pengolahan peternakan khusus sapi, kambing, ayam, dan jenis unggas lainnya. Umumnya masyarakat di Kabupaten Bekasi lebih banyak beternak kambing dan unggas. Pemilikan peternakan sebagian dimiliki oleh penduduk asli Bekasi namun sebagian besar dikelola oleh laki-laki, berikut ini gambaran tentang hal tersebut dalam tabel.

Tabel 4.11
Jumlah Pemilik Lahan Peternakan Berdasarkan Gender Per-Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2016

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Cibarusah	7.610	447	8.057
2	Cikarang Utara	11	-	11
3	Pebayuran	-	-	-
4	Muara gembong	-	-	-
5	Tambun Selatan	-	-	-
6	Kedung waringin	548	-	548
7	Tambun Utara	9	-	9
8	Bojong Mangu	854	-	854
9	Cikarang Pusat	39	17	56
10	Babelan	-	-	-
11	Karang Bahagia	3.281	365	3.646
12	Sukakarya	4.151	1.085	5.236
13	Tambelang	-	-	-
14	Cabang Bungin	706	25	731
15	Sukatani	870	400	1.270

16	Setu			53.309
17	Serang Baru			3.209
18	Cikarang Selatan			2
19	Cikarang Timur			3.152
20	Cibitung			139
21	Cikarang Barat	553	62	615
22	Tarumajaya	1.101	57	1.158
23	Sukawangi			15
Jumlah Total		19.733	2.458	82.017

Sumber: Data dari seluruh kecamatan di kabupaten bekasi yang telah diolah tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan lahan peternak mayoritas dipegang oleh laki-laki, adapun perempuan hanya sedikit yang memegang peran dalam pemilikan lahan peternakan.

E. Program Keluarga Berencana dalam Statistik Gender

Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana oleh pemerintah adalah keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Gerakan Keluarga Nasional Indonesia telah dijalankan dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu sejak tahun 70-an dan masyarakat dunia menganggap Indonesia berhasil menurunkan angka kelahiran yang signifikan. Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya¹⁸.

Untuk mensukseskan program KB tersebut maka dibutuhkan tenaga lapangan sebagai bagian dari sosialisasi tentang pentingnya kualitas berkeluarga dengan membatasi

¹⁸ <http://doktersehat.com/pengertian-dan-tujuan-keluarga-berencana-kb/#ixzz2c1gebi8>, diakses 28 Agustus 2017

jumlah anak. Berdasarkan tujuan tersebut maka dibutuhkan UPT PLKB berdasarkan gender, mengingat jumlah pengguna KB mayoritas adalah perempuan.

Tabel 4.12
Jumlah Pegawai UPT PLKB Berdasarkan Gender Per Kecamatan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2017

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Cibarusah	4	1	5
2	Cikarang Utara	6	2	8
3	Pebayuran	2	4	6
4	Muara gembong	1	1	2
5	Tambun Selatan	6	5	11
6	Kedung waringin	2	0	2
7	Tambun Utara	4	2	6
8	Bojong Mangu	3	2	5
9	Cikarang Pusat	4	3	7
10	Babelan	0	4	4
11	Karang Bahagia	5	2	7
12	Sukakarya	2	3	5
13	Tambelang	2	0	2
14	Cabang Bungin	4	1	5
15	Sukatani	0	0	0
16	Setu	5	3	8
17	Serang Baru	4	1	5
18	Cikarang Selatan	3	5	8
19	Cikarang Timur	6	1	7
20	Cibitung	3	6	9
21	Cikarang Barat	4	5	9
22	Tarumajaya	0	6	6
23	Sukawangi	2	3	5
Jumlah Total		72	60	132

Sumber: Data dari seluruh kecamatan di kabupaten bekasi yang telah diolah tahun 2017

Berdasarkan data di lapangan menunjukkan bahwa jumlah tenaga lapangan yang menyuluh program-program KB rata-rata adalah laki-laki. Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa peran perempuan sebenarnya lebih baik mengingat para pengguna KB adalah perempuan. Oleh karena itu perlu pengkajian yang lebih dalam apakah peran penyuluh perempuan lebih efektif dalam mensosialisasikan program-program yang berkaitan dengan KB.

Adapun untuk mengetahui jumlah pengguna KB dapat dilihat dari gambaran berikut ini:

Tabel 4.13
Jumlah Pengguna KB Berdasarkan Gender Per Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2016

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Cibarusah	975	14.366	15.341
2	Cikarang Utara	1.141	29.704	30.845
3	Pebayuran	533	20.848	21.381
4	Muara gembong	62	6.537	6.599
5	Tambun Selatan	1.128	26.567	27.695
6	Kedung waringin	514	10.830	11.345
7	Tambun Utara	355	23.484	24.209
8	Bojong Mangu	205	6.385	6.593
9	Cikarang Pusat	315	11.136	11.451
10	Babelan	935	42.313	43.245
11	Karang Bahagia	423	20.319	20.742
12	Sukakarya	94	11.764	11.858
13	Tambelang	408	8.548	8.956
14	Cabang Bungin	220	9.125	9.345
15	Sukatani	141	1.654	1.795
16	Setu	293	27.167	27.490
17	Serang Baru	449	15.170	15.619
18	Cikarang Selatan	660	25.123	25.783
19	Cikarang Timur	0	23.196	23.196
20	Cibitung	1.234	28.865	30.099

21	Cikarang Barat	728	21.183	21.911
22	Tarumajaya	2.967	9.399	12.366
23	Sukawangi	201	8.784	8.985
Jumlah Total		93.981	472.862	566.839

Sumber: Data dari seluruh kecamatan di kabupaten bekasi yang telah diolah tahun 2016

Berdasarkan gambar dan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pengguna KB umumnya adalah perempuan yang jumlahnya 83.42% dari total pengguna. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kemudahan akses dan pelayanan kesehatan terhadap perempuan KB dan tentunya hal ini harus didorong oleh pemerintah daerah.

F. Pegawai Negeri Sipil di Tingkat Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi, Kecamatan dan Desa Dalam Statistik Gender

Pada proses pembuatan kebijakan, maka peran gender juga sangat menentukan, khususnya peran pegawai negeri sipil dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat dari perspektif perbedaan kebutuhan baik perempuan ataupun laki-laki. Perspektif perempuan dan laki-laki terhadap pelayanan publik memiliki pandangan berbeda, sehingga keadaan ini tentu dapat membantumenyediakan masukan terhadap pembangunan yang berkaitan dengan pelayanan, misalnya dalam hal kesehatan, berikut ini jumlah PNS menurut golongan dan jenis kelamin di Kabupaten Bekasi berdasarkan jabatan struktural.

Tabel 4.14
Daftar Normatif Pejabat Struktural Berdasarkan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Periode September 2016

No	Jabatan Struktural Berdasarkan Eselon	Jumlah Jabatan	%	Laki-laki	%	Perempuan
1	Eselon 2a	1	0.09	1	-	0
2	Eselon 2b	36	3.10	33	0.28	3

3	Eselon 3a	76	6.39	68	0.75	8
4	Eselon 3b	128	10.34	110	1.69	18
5	Eselon 4a	583	40.98	436	13.82	147
6	Eselon 4b	126	6.67	71	5.17	55
7	Eselon 5a	114	9.15	76	3.57	38
Jumlah Total		1.064	74.72	795	25.28	269

Sumber: Diolah dari data Portal.bekasikad.go.id

Berdasarkan tabel di atas, bahwa jabatan struktural masih banyak didominasi laki-laki. Adapun persentase perempuan yang menduduki jabatan struktural antara 0.28 sampai dengan 13.82 (atau seluruhnya hanya 25.28%). Jika diamati bahwa jabatan struktural baik laki-laki maupun perempuan lebih banyak menduduki jabatan eselon 4a. namun ditingkat ini jumlah perempuan masih sangat sedikit yaitu 13.82% (147 dari 583 orang) dari jumlah laki-laki sebesar 40,98% (436 dari 583 orang). Persaingan untuk menduduki jabatan struktural tampaknya kurang diminati perempuan meskipun demikian peluang dan kesempatan sangat terbuka bagi perempuan untuk mendapatkan jabatan struktural asalkan memiliki prestasi yang dapat menunjukkan kemampuannya berjuang untuk menduduki jabatan penting di pemerintah daerah Kabupaten Bekasi.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan di lingkungan Pemda Kabupaten Bekasi dengan beberapa aparatur perempuan, bahwa perempuan cenderung tidak terlalu ambisi untuk menduduki jabatan struktural. Salah satu alasannya adalah karena untuk menduduki jabatan tersebut harus melalui persaingan yang terlampau politis, sehingga perempuan seringkali menolak untuk menggunakan trik-trik politis tersebut. Sedangkan alasan lainnya adalah bahwa perempuan bekerja sebagai PNS ada anggapan hanya membantu suami. Ada persepsi bekerja sebagai pelayan masyarakat tidak perlu untuk bekerja keras. Oleh karena kecenderungan yang terlihat

perempuan cenderung akan memilih jabatan fungsional dibandingkan struktural sebagai penentu kebijakan.

Namun ada beberapa PNS perempuan yang juga mampu untuk menjabat sampai tingkat eselon 2b dan 3a, dan pada umumnya mereka berkarir karena didukung oleh keluarga. Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara, kedudukan jabatan perempuan di eselon 3 belum menjamin dukungan yang kuat dan terakomodirnya konsep pengarusutamaan gender terhadap persoalan perempuan dan gender didalam pembangunan. Oleh karena itu, sejumlah posisi/jabatan ditempat strategis yang dipegang oleh perempuan belum sepenuhnya mampu mengangkat isu-isu gender dan dan mengoptimalkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Sedangkan pada tahun 2015-2016 jumlah PNS dan tenaga kerja kontrak di tingkat kecamatan menunjukkan jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan yang rata-rata hanya 10 sampai dengan 20 persen. Keadaan ini menunjukkan bahwa di level kecamatan perempuan dirasakan masih sangat minim, sehingga seringkali pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat perempuan tidak tersentuh oleh kecamatan, misalnya dalam hal program-program pembangunan dari pusat seringkali tidak menyentuh kepentingan perempuan di tingkat Desa dan Kecamatan karena masih adanya pemikiran yang bias atau netral gender. Misalkan saja tidak adanya data base tentang jumlah perempuan kepala rumah tangga, jumlah perempuan pekerja informal, jumlah perempuan pengguna KB dan jenis alat KB sebagaimana yang terlihat pada tabel yang menjelaskan keterangan diatas, demikian pula kepedulian terhadap data berbasis gender masih sangat minim terlihat dari gambaran tabel dibawah ini yang menunjukkan bahwa kepedulian data masih sangat minim. Perlu ditingkatkan adanya kesadaran membuat data gender, sehingga program-program pembangunan gender dapat dipenuhi sesuai kebutuhan berdasarkan gender.

Tabel 4.15
Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Tingkat Kecamatan Di
kabupaten Bekasi Tahun 2015/2016

No	Nama Kecamatan	PNS Laki-laki	PNS Perempuan	Total
1	Cibarusah	25	3	28
2	Cikarang Utara	25	6	31
3	Pebayuran	26	2	28
4	Muara gembong	13	2	15
5	Tambun Selatan	18	12	30
	Kedung			
6	waringin	17	4	21
7	Tambun Utara	18	3	21
8	Bojong Mangu	20	0	20
9	Cikarang Pusat	22	1	23
10	Babelan	17	4	21
11	Karang Bahagia	19	2	21
12	Sukakarya	10	2	12
13	Tambelang	19	2	21
14	Cabang Bungin	24	-	24
15	Sukatani	12	12	24
16	Setu	24	8	31
17	Serang Baru	18	5	23
	Cikarang			
18	Selatan	22	10	32
19	Cikarang Timur	24	9	33
20	Cibitung			Tidak ada data
21	Cikarang Barat			Tidak ada data
22	Tarumajaya			Tidak ada data
23	Sukawangi	28	5	33
Jumlah Total		285	55	340

Sumber: Data dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi yang telah diolah tahun 2016

G. Peran dalam Kelembagaan Politik Pemerintahan Berdasarkan Statistik Gender di Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Undang-Undang UU Nomor 2 Tahun 2008 sebenarnya sudah memulai kebijakan afirmasi di internal partai politik melalui pasal pembentukan dan kepengurusan partai politik yang menyertakan paling kurang 30% perempuan, termasuk pula mengenai keterwakilan perempuan di parlemen, ini artinya setiap partai politik harus atau diwajibkan untuk memperhatikan kesetaraan gender dalam menempatkan perempuan dalam kepengurusan partai politik maupun sebagai calon legislatif sebesar 30%. Tujuan dari perlunya mempertimbangkan kesetaraan gender dalam kepengurusan dilatarbelakangi dengan banyaknya isu-isu kebijakan maupun keputusan yang masih mengesampingkan kepentingan perempuan. Hal ini terlihat dari sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh partai politik masih memprioritaskan kebijakan yang bersifat netral gender dan seringkali tidak menempatkan perempuan dalam subyek pembangunan. Beberapa program kebijakan sering kali tidak memperhatikan persoalan atau isu ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di dalam proses membuat program, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Salah satu contoh dalam penanganan pelayanan publik terhadap kesejahteraan perempuan seperti perlindungan perempuan dan anak, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, penanganan penjualan perempuan, penanganan perempuan pekerja informal, belum sepenuhnya menjadi perhatian para pembuat kebijakan. Pembuatan rancangan peraturan daerah serta merta tidak memfokuskan pada perlunya keterlibatan perempuan dalam menyusun rencana pembangunan, demikian pula dalam proses *hearing* atau dengar pendapat, perempuan seringkali kurang mendapat peran untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Oleh karena peran perempuan dalam sektor publik khususnya menyangkut pembuat/pengambilan keputusan di legislatif harus mendapat tempat penting, sehingga aspek

pembangunan dalam perspektif perempuan dapat diwujudkan dengan baik. Berikut ini data yang diperoleh sebagai gambaran kepengurusan partai politik perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki:

Tabel 4.16
Pengurus Partai Politik Berdasarkan Gender Tahun 2015-2016
di Kabupaten Bekasi

NO	PARTAI	DPD			DPC		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Partai Amanat Nasional (PAN)	6	-	6			
2	Partai Kesejahteraan Sosial (PKS)				4	-	4
3	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)				4	2	6
4	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)				4	-	4
5	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	4	-	4			
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	4	1	5			
7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)				4	-	4
8	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)				4	-	4
9	Partai Karya Perjuangan (PKP)				4	-	4
10	Partai Demokrasi Rakyat (DEMOKRAT)				4	-	4
11	Partai Bulan Bintang (PBB)				4	-	4
Jumlah Total		14	1	15	32	2	34

Sumber: Kantor kesatuan bangsa dan politik, November 2016

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwa kepengurusan di partai politik masih dibawah 30%, padahal ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik didalamnya terdapat ketentuan mengenai kepengurusan perempuan di parpol harus memenuhi angka tersebut. Jumlah perempuan baik di tingkat DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan DPC (Dewan Pimpinan Cabang) perempuan masih minoritas bahkan masih terdapat partai yang pada kepengurusannya tidak terdapat sama sekali keterwakilan perempuan di dalamnya. Hal ini menunjukkan peran perempuan dalam politik di Kabupaten Bekasi masih sangat minim, meskipun ada mereka pun hanya menjadi pelengkap, terlihat ketika jelang pemilukada DPRD maupun pemilukada DPRD Provinsi hingga DPR-RI, perempuan sebagai caleg baru ditempatkan dalam daftar, untuk memenuhi ketentuan 30% caleg perempuan, namun anehnya didalam kepengurusan parpol sebaliknya belum memenuhi persyaratan tersebut. Adapun kenyataan ini memperlihatkan perempuan dalam politik masih dianggap sebagai pelengkap untuk formalitas atau pemenuhan administratif kebutuhan parpol untuk mengikuti pemilu legislatif.

Persoalan perempuan berpartisipasi politik di partai politik juga masih memiliki hambatan cukup banyak, mengingat kegiatan politik masih dianggap bukan wilayah kegiatan perempuan. Anggapan ini semakin kuat ketika perempuan secara politis harus bersaing dengan laki-laki yang didasari jumlah kuantitas dan kualitas waktu untuk berkiperah di dunia politik lebih banyak, karena anggapan kegiatan politik adalah kegiatan yang membutuhkan energi dan waktu yang cukup banyak dimana perempuan sudah disibukkan dengan kegiatan domestik (rumah tangga). Oleh karena itu, keadaan ini menyebabkan perempuan sangat minim untuk dapat berkiperah di partai politik.

Hambatan lainnya adalah ongkos politik yang harus dibayar untuk duduk menjadi pengurus maupun calon legislatif membutuhkan modal yang cukup besar, mengingat

untuk mendapatkan suara selain memiliki mental juga kemampuan untuk membiayai sendiri pemilu legislatif. Perlu dipahami perempuan cenderung tidak memiliki akses modal besar adapun yang berhasil duduk dalam kepengurusan dilatarbelakangi oleh pekerjaan perempuan sebagai pengusaha atau suami yang memang sudah berkiprah dipartai politik dan sudah mendapatkan posisi puncak di partai politik dan ketiga Karena faktor turunan dari tokoh politik yang juga memiliki kemampuan modal untuk politik. Inilah yang secara umum dapat ditemukan disetiap partai politik yang ada di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif periode 2014-2019, terlihat bahwa jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Bekasi masih dibawah 30%. Padahal persyaratan jumlah perempuan di legislatif dalam undang-undang harus memenuhi 30%. Tujuan perempuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam perwakilan rakyat bertujuan agar keputusan ataupun kebijakan yang dibuat dapat menyeimbangkan suara perempuan dalam mempertimbangkan segala aspek kebijakan publik.

Tabel 4.17
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan Jenis Kelamin
2014-2019

No	Partai / Nama Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD	
		Laki-laki	Perempuan
I	Partai Golkar(10 Orang)		
	1. Iip Sarip Bustomi	1	
	2. Sunandar	1	
	3. Kardin	1	
	4. Marico	1	
	5. Muhtada Sobirin	1	
	6. Yoyoh Masruroh		1
	7. Novi Yasin		1
	8. Ejen Zaenal Mutaqin	1	
	9. Eka Supriatmaja	1	
	10. Sarim Saepudin	1	

II	A. Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan (8 Orang)		
	1. Jejen Sayuti	1	
	2. Tata Saputra	1	
	3. Solaeman	1	
	4. Suriat	1	
	5. Abdul Rosid	1	
	6. Aep Saepul Rohman	1	
	7. Yudhi Darmansyah	1	
	8. Nyumarno	1	
III	B. Partai Gerakan Indonesia Raya (7 Orang)		
	1. Danto Bin H. Amin	1	
	2. Anden	1	
	3. Lydia Fransisca		1
	4. Jalika		1
	5. Haryanto	1	
	6. Mirukyati		1
	7. Daris	1	
IV	C. Partai Keadilan Sejahtera (5 Orang)		
	1. Fatma Hanum		1
	2. Zaenal Muttaqien	1	
	3. Zaenudhin	1	
	4. Samsul Falah	1	
	5. Mohamad Abdurrahman	1	
V	D. Partai Demokrat (5 Orang)		
	1. Mulyana Muhtar	1	
	2. Mustakim	1	
	3. Wardja Mihardja	1	
	4. Taih Minarno	1	
	5. Abay Subarna	1	
VI	E. Partai Amanat Nasional (5 Orang)		
	1. Nurdin Muhidin	1	

	2. Suganda	1	
	3. Jamil	1	
	4. Muhtadi Muntaha	1	
	5. Namat Hidayat	1	
VII	F. Partai Persatuan Pembangunan (3 Orang)		
	1. Cecep Noor	1	
	2. Nunung		1
	3. Kairan	1	
VIII	G. Partai Nasional Demokrat (3 Orang)		
	1. Ali Arsono	1	
	2. Teten Kamaludin	1	
	3. Dede Iswadi	1	
IX	H. Partai Hati Nurani Rakyat (2 Orang)		
	1. Amal Kamaludin	1	
	2. Saefulloh	1	
X	I. Partai Bulan Bintang (1 Orang)		
	1. Iin Farihin	1	
XI	J. Partai Kebangkitan Bangsa (1 Orang)		
	1. Abdul Kholik	1	
	%	86	14
	Jumlah Total	43	7

Sumber: KPUD Kab. Bekasi 2016

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Bekasi belum memenuhi syarat kuota 30% dari jumlah keseluruhan anggota DPRD. Bila dilihat dari jumlah anggota DPRD kabupaten bekasi maka jumlah anggota dewan sebanyak 43. Namun demikian jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Bekasi hanya memenuhi 0.14% dari total 43 orang. Artinya Anggota DPRD idealnya memiliki jumlah anggota perempuan sebanyak 13 orang

perwakilan, sedangkan laki-laki 30 orang bila diperhitungkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 30%.

Selain peran perempuan di bidang politik juga dapat dilihat pada aspek lain yaitu pada tingkatan birokrasi terkecil, yakni padalingkup pemerintahan desa yaitu di Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini untuk melihat sejauh mana perempuan di tingkat desa ikut berpartisipasi untuk mendapatkan posisi strategis dalam mengelola pembangunan desa bersama kepala desa. Berikut ini data yang diperoleh berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bekasi.

Tabel 4.18
Perbandingan Anggota BPD Periode 2 di Pemerintah Desa
Per Kecamatan berdasarkan gender Di Kabupaten Bekasi
Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Pengurus	Pengurus	
			L	P
1	Tarumajaya	86	79	7
2	Babelan	67	67	-
3	Sukawangi	59	59	-
4	Tambelang	55	51	4
5	Tambun Utara	80	77	3
6	Tambun Selatan	99	92	7
7	Cibitung	60	58	2
8	Cikarang Barat	103	101	2
9	Cikarang utara	111	105	6
10	Karang bahagia	74	69	5
11	Cikarang timur	69	69	-
12	Kedungwaringin	67	62	5
13	Pebayuran	121	111	10
14	Sukakarya	61	57	4
15	Sukatani	71	68	3
16	Cabang bungin	72	67	5
17	Muara gembong	52	50	2
18	Setu	105	103	2

19	Cikarang selatan	71	70	1
20	Cikarang pusat	54	52	2
21	Serang baru	70	67	3
22	Cibarusah	67	62	5
23	Bojongmangu	44	44	-
Jumlah total		1.718	1.640	78

Sumber: Data dari setiap Kecamatan di Kab. Bekasi yang telah diolah tahun 2016

Hal menarik lainnya menyangkut kesetaraan gender yaitu dalam pembuatan kebijakan adalah dengan melihat jumlah kepala desa berdasarkan gender. Kabupaten Bekasi memiliki 182 desa dengan demikian perlu adanya kesempatan bagi perempuan dalam mengelola kebijakan yang memiliki perspektif tersendiri dalam memahami kebutuhan akan pembangunan. Berikut ini gambaran tentang jumlah kepala desa berdasarkan gender.

Tabel 4.19
Jumlah Kepala Desa Berdasarkan Gender di Kabupaten Bekasi

No	Kecamatan	laki-laki	perempuan
1	Babelan	7	0
2	Tarumajaya	7	1
3	Sukawangi	7	0
4	Tambelang	7	0
5	Tambun utara	8	0
6	Tambun selatan	7	2
7	Cibitung	6	0
8	Cikarang barat	10	1
9	Cikarang utara	11	0
10	Karang bahagia	8	0
11	Cikarang timur	7	0
12	Kedung waringin	7	0
13	Pebayuran	11	2
14	Sukakarya	7	0
15	Sukatani	7	0

16	Cabang bungin	8	0
17	Muaragembong	6	0
18	Setu	10	1
19	Cikarang selatan	6	1
20	Cikarang pusat	5	1
21	Serang baru	7	1
22	Cibarusah	7	0
23	bojongmangu	6	0
Jumlah Total		172	10

Sumber: Diolah dari website www.bekasikab.go.id 2016

Berdasarkan data yang diperoleh dari sejumlah terpilihnya kepala desa di Kabupaten Bekasi secara serentak tahun 2013, maka terdapat sejumlah 10 kepala desa perempuan seperti Desa Setiasih, Desa Lamban Sari, Desa Setiadharma, Desa Jatiwangi, Desa Bantarjaya, Desa Kertasari, Desa Muktijaya, Desa Sukaresmi, Desa Pasir Tanjung, Desa Cilangkara. Sejumlah kepala desa ini memiliki latar belakang berbeda, mereka umumnya terpilih karena merupakan bagian dari tokoh masyarakat maupun pengusaha di daerah setempat. Keberadaan perempuan sebagai kepala desa memiliki karakteristik tersendiri dalam manajemen pemerintahan. Hal ini menarik karena sejak lama gambaran kepala desa selalu dikaitkan dengan kepemimpinan laki-laki sebagai figur bapak. Namun dengan keterbukaan demokrasi menyebabkan perempuan juga berpeluang untuk menjabat kepala desa, meskipun jumlahnya masih sangat sedikit.

Selain menjadi anggota BPD di desa, terdapat sejumlah perempuan yang juga duduk sebagai tokoh masyarakat yang tentunya memiliki pengaruh terhadap perkembangan pembangunan di desa. Para tokoh perempuan ini berlatar belakang sebagai tokoh agama (penceramah). Istri kepala desa yang aktif, serta merupakan keturunan dari tokoh sebelumnya yang dianggap sebagai penerus dan hal ini tidak mengherankan ketika perempuan dicalokan untuk menjadi calon legislatif daerah atau penyumbang suara untuk

kampanye. Maka kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ketokohan. Tabel berikut ini menggambarkan tentang perbandingan jumlah tokoh masyarakat berdasarkan gender di setiap kecamatan di Kabupaten Bekasi.

Tabel 4.20
Jumlah Tokoh Masyarakat Berdasarkan Gender Dan Per
Kecamatan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2016

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Cibarusah	10	5	15
2	Cikarang Utara	1.452	361	1.813
3	Pebayuran	100	100	200
4	Muara gembong	-	-	-
5	Tambun Selatan	106	45	151
6	Kedung waringin	15	10	25
7	Tambun Utara	-	-	-
8	Bojong Mangu	9	13	22
9	Cikarang Pusat	35	6	41
10	Babelan	450	215	665
11	Karang Bahagia	8	2	10
12	Sukakarya	4	-	4
13	Tambelang	-	-	-
14	Cabang Bungin	45	10	55
15	Sukatani	7	-	7
16	Setu	40	20	60
17	Serang Baru	40	20	60
18	Cikarang Selatan	20	10	30
19	Cikarang Timur	24	9	33
20	Cibitung	38	0	38
21	Cikarang Barat	160	32	192
22	Tarumajaya	0	0	0
23	Sukawangi	25	25	50
Jumlah Total		2.588	883	3.471

Sumber: Data dari setiap kecamatan di kabupaten bekasi yang telah diolah tahun 2016

Berbeda dengan jumlah perempuan yang duduk di BPD maupun kepala desa, tokoh perempuan di Kabupaten Bekasi memiliki jumlah yang juga cukup besar, meskipun masih dibawah jumlah tokoh laki-laki. Para tokoh masyarakat ini memiliki peran penting untuk memberi pengaruh kepada masyarakat sehingga tokoh ini juga menjadi penentu pula dalam proses membuat kebijakan. Namun demikian, tokoh perempuan cenderung aktif dalam kegiatan organisasi yang bersifat domestik. Seperti menjadi ketua PKK, Ketua Majelis Taklim dimana organisasi bersifat sosial dibandingkan politik. Hal ini tentu akan mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam proses pembuatan kebijakan atau keputusan.

Sekretaris desa merupakan bagian dari struktur di pemerintah desa, dimana sekretaris desa merupakan pegawai negeri sipil yang merupakan perpanjangan tangan dari supradesa (pemerintah daerah), untuk mempermudah urusan administrasi negara yang menyangkut pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat desa.

Tabel 4.21
Jumlah Sekretaris Desa Berdasarkan Gender Per Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2016

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Cibarusah	7	0	7
2	Cikarang Utara	7	0	7
3	Pebayuran	13	0	13
4	Muara gembong	6	0	6
5	Tambun Selatan	8	2	10
6	Kedung waringin	5	2	7
7	Tambun Utara	8	0	8
8	Bojong Mangu	6	0	6
9	Cikarang Pusat	5	0	5
10	Babelan	9	0	9
11	Karang Bahagia	8	0	8
12	Sukakarya	7	0	7

13	Tambelang	6	1	7
14	Cabang Bungin	7	0	7
15	Sukatani	6	0	6
16	Setu	40	20	60
17	Serang Baru	40	20	60
18	Cikarang Selatan	20	10	30
19	Cikarang Timur	7	0	7
20	Cibitung	6	0	6
21	Cikarang Barat	11	0	11
22	Tarumajaya	0	0	0
23	Sukawangi	25	25	50
Jumlah Total		257	80	337

Sumber: Data dari setiap kecamatan di Kabupaten Bekasi yang telah diolah tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menjadi sekretaris desa masih sangat minim, namun ada beberapa kecamatan yang justru menempatkan perempuan menduduki jabatan sekretaris desa seperti Tambun Selatan dan Kedungwaringin. Hal yang menarik dengan kedudukan perempuan sebagai sekretaris desa akan membantu kepala desa maupun pemerintah supradesa (pemerintah daerah) untuk menjadi jembatan guna membangun hubungan atau koordinasi antara pemerintah desa dengan supradesa untuk memberikan masukan atau arahan mengenai kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut isu-isu perempuan. Oleh karena itu, perempuan yang duduk sebagai sekretaris desa harus memiliki kemampuan bahkan peka terhadap persoalan-persoalan perempuan di masyarakat desa.

Selain jumlah sekretaris desa berdasarkan gender, berikut ini jumlah perangkat desa berdasarkan gender, dimana jabatan perangkat desa ini terdiri dari pemerintah desa meliputi: Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sedangkan perangkat desa terdiri atas: Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya. Yang dimaksud dengan perangkat desa lainnya adalah:

1. Sekretaris desa: disebut urusan yang terdiri atas:
 - a. Kepala urusan pemerintahan
 - b. Kepala urusan pembangunan, dan
2. Kepala urusan umum
3. Pelaksana teknis lapangan disebut Pamong, yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat setempat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Unsur kewilayahan: disebut Dusun yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan masyarakat setempat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Tabel 4.22
Jumlah Perangkat Desa Berdasarkan Gender Per Kecamatan
di Kabupaten Bekasi Tahun 2016

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Cibarusah	56	0	56
2	Cikarang Utara	213	6	219
3	Pebayuran	61	4	65
4	Muara gembong	75	0	75
5	Tambun Selatan	89	33	122
6	Kedung waringin	70	0	70
7	Tambun Utara	140	5	145
8	Bojong Mangu	53	1	54
9	Cikarang Pusat	0	0	0
10	Babelan	86	0	86
11	Karang Bahagia	96	0	96
12	Sukakarya	69	1	70
13	Tambelang	48	1	49
14	Cabang Bungin	80	0	80
15	Sukatani	25	9	34
16	Setu	62	6	68
17	Serang Baru	76	4	80
18	Cikarang Selatan	62	8	70
19	Cikarang Timur	34	1	35
20	Cibitung	72	7	79
21	Cikarang Barat	108	2	110

22	Tarumajaya	0	0	0
23	Sukawangi	70	5	75
Jumlah Total		1.645	93	1.738

Sumber: Data dari setiap kecamatan di Kabupaten Bekasi yang telah diolah tahun 2016

Berdasarkan jumlah perempuan yang duduk sebagai perangkat desa ternyata perempuan berjumlah masih sangat minim, ini terlihat jumlah perempuan hanya mencapai 5.35% dari total jumlah 1738 orang, hal ini menunjukkan bahwa perempuan belum mampu membangun akses untuk duduk di pemerintahan desa khususnya sebagai kepala desa, namun demikian tampaknya masyarakat desa sebagian sudah mulai dapat menerima perempuan untuk menjadi kepala desa melalui pemilihan kepala desa, seperti misalnya di Kecamatan Tambun Selatan terdapat sejumlah perempuan yang duduk sebagai perangkat desa sebanyak 33 orang.

H. Pengembangan Usaha kecil Menengah dan Koperasi dalam Statistik Gender

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, maka salah satu sektor pengembangan yang harus ditingkatkan adalah pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi. Hal ini dilatarbelakangi dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan ekonomi mandiri yang dapat memajukan usaha masyarakat agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah telah memberikan fasilitas terhadap pengembangan ekonomi dengan memberikan pinjaman, pelatihan dan pengetahuan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan institusi.

Berdasarkan hal itu pula pengembangan koperasi sangat bergantung dari kemampuan SDM mengelola koperasi, kemampuan pengelolaan koperasi tidak bergantung kepada latar belakang gender, namun yang menarik adalah stigma bahwa koperasi yang dikelola perempuan lebih baik jika dibandingkan pengelolaan koperasi yang dijalankan laki-laki.

Hal ini dapat dibuktikan dengan seringkali yang ditunjuk

menjadi bendahara koperasi rata-rata adalah laki-laki. Namun demikian tabel berikut ini menunjukkan gambaran yang berbeda tentang stigma itu.

Tabel 4.23
Jumlah Koperasi Dan Pengurus Koperasi Berdasarkan Gender di Kabupaten Bekasi Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi	pengurus	
			L	P
1	Babelan	43	130	10
2	Bojongmangu	5	13	2
3	Cabang bungin	18	58	6
4	Cibarusah	11	33	3
5	Cibitung	33	104	5
6	Cikarang barat	140	410	10
7	Cikarang pusat	36	108	7
8	Cikarang selatan	120	360	8
9	Cikarang timur	14	42	4
10	Cikarang utara	104	310	4
11	Karang bahagia	11	30	3
12	Kedung waringin	12	34	4
13	Muaragembong	16	48	3
14	Pebayuran	12	36	4
15	Serang baru	7	218	3
16	Setu	26	75	5
17	Sukatani	19	55	2
18	Sukakarya	13	39	4
19	Sukawangi	4	8	3
20	Tambelang	14	40	5
21	Tambun selatan	141	413	10
22	Tambun utara	13	38	3
23	Tarumajaya	22	64	4
Jumlah		834	2.666	112

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan
UMKM Kab. Bekasi tahun 2016

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah pengurus koperasi dan kepengurusan banyak dijalani oleh laki-laki dibandingkan perempuan, dimana pengurus koperasi yang laki-laki berjumlah 2.666 orang sedangkan perempuan sebanyak 112 orang. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi masih lebih banyak melibatkan laki-laki dibandingkan perempuan. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam koperasi juga harus diperhatikan, mengingat koperasi bisa menjadi sumber ekonomi dan pengembangan usaha kecil menengah dan tentunya akan dapat membantu perkembangan ekonomi rumah tangga terutama bagi perempuan kepala rumah tangga.

Berikut ini merupakan data yang menggambarkan jumlah pengurus UMKM baik perempuan dan laki-laki untuk menggambarkan seberapa jauh peran perempuan dan laki-laki dalam membangun usaha dalam bentuk UMKM.

Tabel 4.24
Data Jumlah UMKM Dan Kepengurusan Berdasarkan
Gender Di Kabupaten Bekasi

No	Kecamatan	Jumlah UMKM	Jumlah Pengurus	
			L	P
1	Cikarang pusat	28	20	8
2	Cikarang barat	33	22	11
3	Cikarang timur	8	8	-
4	Cikarang selatan	7	6	1
5	Cikarang utara	35	30	5
6	Tambun selatan	46	24	22
7	Tambun utara	21	13	8
8	Cibitung	14	12	2
9	Babelan	9	7	2
10	Tarumajaya	6	4	2
11	Muaragembong	14	13	1
12	Kedungwaringin	16	16	-
13	Cibarusah	6	4	2
14	Sukatani	5	4	1

15	Tambelang	23	20	3
16	Setu	66	41	25
17	Karang bahagia	18	15	3
18	Pebayuran	17	15	2
19	Cabang bungin	1	1	-
Jumlah		373	275	98

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan
UMKM Kab. Bekasi tahun 2016

Berdasarkan data diatas bahwa jumlah UMKM yang dikelola laki-laki dan perempuan seluruhnya berjumlah 373 orang namun sebanyak 98 orang wanita telah menjadi pengurus UMKM, sedangkan pengurus laki-laki berjumlah 275 orang. Melihat hal ini maka peran perempuan dalam pengelolaan UMKM perlu juga ditingkatkan, mengingat jenis UMKM yang dikembangkan oleh pemerintah memiliki karakteristik sendiri, misalnya usaha catering, pembuatan kue kering, keripik, dan lain-lain. Sedangkan karakteristik UMKM yang dikelola laki-laki banyak berupa bengkel, toko, las, mebel, dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu ada perhatian pemerintah untuk mengembangkan UMKM yang dikelola oleh perempuan agar tidak terlalu timpang dengan usaha yang dikelola laki-laki.

Sedangkan pada industri makanan dan minuman skala sedang banyak dikelola oleh laki-laki. Kemungkinan untuk membuka modal usaha industri sangat besar, sehingga akses peminjaman modal dengan skala besar sulit bagi perempuan untuk mendapatkannya, karena stigma ini masih menganggap perempuan bekerja atau memiliki usaha hanya membantu pendapatan rumah tangga bukan penghasil utama. Berikut ini tabel yang menggambarkan

sejumlah industri di beberapa kecamatan di Kabupaten Bekasi dengan pengelolaanya dilihat dari latar belakang gender.

Tabel 4.25
Jumlah Industri Makanan Dan Minuman Dan Pengelolaan
Berdasarkan Gender di Kabupaten Bekasi Tahun 2016

NO	KECAMATAN	JUMLAH INDUSTRI	PENGELOLA	
			L	P
1	Cikarang utara	5	4	1
2	Cikarang barat	6	4	2
3	Cikarang selatan	4	3	1
4	Cikarang pusat	5	4	1
5	Setu	3	1	2
6	Tambun selatan	5	4	1
Jumlah		28	20	8

Sumber :Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan
UMKM Kabupaten Bekasi tahun 2015

I. Isu-Isu Gender Spesifik

Program pembangunan di Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan yang pesat terutama sejak diarahkan Kabupaten Bekasi menjadi wilayah industri terutama perakitan. Perkembangan itu telah menggeser kehidupan sosial masyarakat yang dulu adalah petani penggarap dan saat ini beralih profesi dengan menjual jasa perdagangan yang dalam skala kecil. Dampak pembangunan yang dirasakan adalah terjadinya ketidakpemerataan ekonomi dimana terjadi jurang antara kaya dengan miskin antara penduduk asli dengan pendatang. Keadaan ini juga diperparah dengan terjangkitnya penyakit sosial masyarakat yang cenderung mengarah kepada sifat hedonisme, peningkatan kenakalan remaja, munculnya perilaku-perilaku amoral dan sebagainya.

Demikian pula bila ditarik kedalam isu gender, terlihat bahwa isu-isu spesifik gender terkait dengan hubungan relasi antara perempuan dan laki-laki ditinjau dari perubahan sosial diatas antara lain munculnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga maupun publik, meningkatnya tingkat perceraian, kasus menikah di bawah

tangan, penjualan perempuan dan kasus-kasus lainnya yang perlu menjadi perhatian bagi para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut di atas masih sulit ditangani sehingga perlu kebijakan yang dapat membantu untuk mengurangi persoalan-persoalan di atas. Berikut ini beberapa isu yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah di Kabupaten Bekasi menyangkut isu-isu gender spesifik.

1. Isu *trafficking* perempuan (perdagangan perempuan).

Isu penjualan atau perdagangan perempuan sudah lama berlangsung bahkan modus-modus mengenai perdagangan perempuan ini semakin bervariasi, bahkan semakin canggih karena adanya perkembangan alat teknologi komunikasi yang semakin membuka peluang meningkatnya perdagangan perempuan tanpa dapat teridentifikasi oleh pihak kepolisian. Keadaan ini tentunya harus diantisipasi dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai kejahatan yang berpeluang masuk ke ranah privat khususnya remaja dan anak perempuan dengan menggunakan teknologi komunikasi.

Perkembangan industri dan perdagangan jasa perempuan di Kabupaten Bekasi telah membuka peluang penggunaan jasa perempuan yang ditempatkan di pusat-pusat hiburan kadangkala menjual jasa prostitusi terselubung. Melihat keadaan ini perlu kiranya pemerintah Kabupaten Bekasi membentuk kerjasama dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak (P2TP2A) dan KPAD Kabupaten Bekasi yang di dalamnya terhimpun unsur-unsur dari pemerintah, kepolisian dan masyarakat yang berkoordinasi untuk menangani masalah tersebut.

2. Kasus kekerasan dalam rumah tangga

Perkembangan kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat berkaitan dengan masalah sosial dimasyarakat. Tingginya biaya hidup serta kebutuhan ekonomi rumah tangga merupakan salah satu faktor pemicu munculnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Keadaan ini

berdampak pada kekerasan yang lebih meluas dan berkelanjutan sehingga berdampak panjang pada kehidupan sosial masyarakat selanjutnya. Untuk mengantisipasi masalah tersebut perlu ada kebijakan yang mendorong agar lembaga P2TP2A dan KPAD Kabupaten Bekasi dapat ditingkatkan kapasitas kelembagaannya, sehingga dapat membantu pemerintah menangani persoalan-persoalan sosial yang ada dimasyarakat khususnya masalah kekerasan terhadap perempuan.

3. Isu-Isu Hak Kerja Buruh

Semakin tingginya tingkat ekonomi masyarakat mendorong tuntutan yang tinggi bagi buruh untuk mendapatkan upah yang layak demikian pula dengan adanya berbagai kebijakan dari pusat berkaitan dengan kenaikan BBM dan listrik mendorong tuntutan buruh untuk mendapatkan upah lebih tinggi, mengingat kebutuhan hidup juga semakin tinggi. Tuntutan atas hak-hak ini tentu menjadi isu penting, termasuk bagi buruh perempuan perlu menjadi sorotan.

Isu buruh perempuan menyangkut hak-haknya sebagai perempuan seperti tuntutan mendapatkan cuti melahirkan, cuti haid tanpa harus ada pengurangan upah, tuntutan lainnya adalah tunjangan kesehatan dan keluarga juga menjadi penting, terutama bagi kesehatan reproduksinya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan tidak banyak mengalami peningkatan dalam dekade terakhir, dan tetap berada dalam kisaran angka 50 persen. Selain itu, upah atau pendapatan pekerja perempuan jauh lebih rendah dari laki-laki secara rata-rata, yaitu Rp 1,427 juta untuk perempuan dan Rp 1,795 juta untuk laki-laki pada tahun 2016. Sekitar 30 persen pekerja perempuan berstatus pekerja dengan bayaran di bawah UMR. Fakta bahwa sebagian besar penduduk miskin adalah perempuan juga harus disadari oleh semua pihak¹⁹

¹⁹ <http://www.bappenas.go.id> diakses tanggal 7 November 2016

4. Isu Perempuan dan HIV Aids

Dalam lima belas tahun terakhir, angka penularan HIV di dunia turun 35%, cukup signifikan. Di Indonesia secara nasional, meski penderita AIDS berkurang, namun jumlah yang terinfeksi terus meningkat. Secara nasional, jumlah penderita yang terinfeksi HIV sebanyak 32.711 orang (dengan perbandingan gender 59% laki-laki dan 41% wanita). Sedangkan penderita AIDS secara nasional mencapai 5.494 penderita (dengan perbandingan gender 61,6% laki-laki dan 34,4% wanita). Provinsi Jawa Barat menempati peringkat ketiga nasional penderita yang terinfeksi AIDS dengan jumlah 3.740 berada di bawah Jawa Timur 4.508 dan DKI Jakarta 5.851.²⁰

Jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Bekasi belum terdapat data pasti apalagi data terpilah gender. Berdasarkan data dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi bahwa data pada Oktober 2014 menunjukkan bahwa ada 725 orang di Kabupaten Bekasi terjangkit *human immunodeficiency virus infection/acquired immunodeficiency syndrome* (HIV/AIDS). "125 orang penderita HIV dan 600 orang mengidap AIDS," kata Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Bekasi, Muharmansyah Boestari, pada Kamis, 3 Oktober 2013.

Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Bekasi, hingga 2016 ada 711 orang yang terpapar penyakit mematikan tersebut. Pengelola Program KPA Kabupaten Bekasi, Ade Bawono, mengatakan selama 2014 tercatat ada 95 orang pengidap HIV/Aids baru. "Data kami pada 2013 lalu tercatat kasus HIV/Aids ada 616 orang dan kini bertambah 95 orang yang lebih mengesankan, dari ratusan orang dengan HIV/AIDS (ODHA), 16 di antaranya balita. Belasan balita yang dinyatakan positif HIV/AIDS itu karena tertular dari orangtuanya. Diprediksi jumlah balita

²⁰ Data dari United Nation Acquired Immunodeficiency Syndrome yang di muat dalam Tempo Edisi 7-13 Desember 2015.

yang terpapar penyakit tersebut bakal terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah ODHA²¹.

Pengelola Program KPA Kabupaten Bekasi, Ade Bawono mengungkapkan, ratusan ODHA tersebut tersebar di 15 kecamatan. Dijelaskan pula bahwa kesadaran masyarakat terhadap bahaya HIV/AIDS sudah mulai mengalami peningkatan. "Sekarang kesadaran masyarakat sudah mulai ada progres baik dibanding tahun sebelumnya, hal itu terlihat dari banyaknya permintaan alat kontrasepsi dan jarum suntik di puskesmas,"

Dari ratusan ODHA itu, sambung Ade, didominasi kaum perempuan dengan usia rata-rata 24 tahun hingga 29 tahun. Kaum perempuan yang mayoritas ibu rumah tangga itu terpapar virus HIV karena tertular oleh pasangannya. "Persentase penderita HIV/AIDS di kita (Kabupaten Bekasi) memang lebih didominasi dari kelompok perempuan, dari 711 kasus 53 persennya adalah ibu rumah tangga, biasanya ibu rumah tangga tertular oleh pasangan laki-lakinya yang sering gonta-ganti pasangan," ungkapnya.

Ade menyebut jika tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya HIV/AIDS mengalami peningkatan saat ini. Namun demikian, pihaknya tetap melakukan tindakan preventif kepada masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi di beberapa titik, termasuk ke sejumlah sekolah. Guna mencegah penyebaran HIV/Aids, Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait bahaya HIV/Aids. "Pemerintah daerah juga menambah dari tiga Puskesmas yang melayani penderita HIV/Aids, kini menjadi 10 Puskesmas yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi," ujarnya.

Resiko besar penularan HIV AIDS ada pada perempuan karena memiliki alat reproduksi yang rentan dengan penularan penyakit ini. Para pekerja seks komersil

²¹ <http://bekasikab.go.id/berita-penderita-aids-di-kabupaten-bekasi-capai-700-orang.html>

juga rentan terhadap penyakit ini. Sehingga perlu ada upaya untuk mencegah agar perluasan tidak semakin menyebar. Kondisi di Kabupaten Bekasi yang menjadi wilayah urban dengan mobilisasi cukup tinggi juga mendorong terbukanya masalah pekerja seks komersial dan serta penggunaan obat-obat terlarang di sejumlah tempat hiburan. Namun data mengenai hal ini masih sangat minim, padahal kecenderungan penularan penyakit ini cukup besar dan berpotensi semakin meluas.

Salah satu cara penanganan penyakit menular ini adalah dengan terus mensosialisasikan mengenai bahaya HIV AIDS kepada masyarakat khususnya yang bekerja di wilayah rentan HIV AIDS. Adapun penanganan para korban yang sudah menjangkit penyakit ini adalah dengan memberikan advokasi serta bantuan hidup untuk tetap dapat hidup di masyarakat tanpa harus malu. Jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Bekasi belum terdapat data pasti apalagi data terpilah gender. Jumlah pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga 1 Desember 2016, catatan Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Bekasi ada 711 orang yang positif HIV/AIDS. Berdasarkan data tersebut dimungkinkan akan terus meningkat. Pimpinan KPA Kabupaten Bekasi mengatakan bahwa kebanyakan penularan virus HIV/AIDS disebabkan Karena hubungan seksual.

5. Isu Tenaga Kerja Wanita Luar Negeri

Isu tenaga kerja wanita menjadi isu penting karena sebagian besar devisa Negara diperoleh dari para pekerja luar negeri, namun sayangnya para pahlawan devisa sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik di luar negeri, sehingga banyak pekerja luar negeri yang perlu mendapatkan perlindungan khususnya dari Negara. Beberapa kasus yang diliput di media menunjukkan bahwa ada beberapa tenaga kerja wanita diluar negeri yang mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Beberapa

informasi yang didapatkan para pekerja wanita yang dikirim di luar negeri memiliki ketrampilan yang sangat rendah, sehingga seringkali mereka tidak mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik, akibatnya banyak TKW yang mendapatkan perlakuan tidak baik seperti disiksa dan dilecehkan.

6. Isu transportasi dan pelayanan publik ramah perempuan dan anak

Semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi tidak mendorong pertumbuhan pelayanan transportasi publik dan pelayanan publik yang ramah terhadap kebutuhan perempuan dan anak. Transportasi publik di Kabupaten Bekasi masih dikategorikan jauh dari layak, tingkat kemacetan semakin tinggi dan jumlah kendaraan pribadi juga semakin meningkat. Keadaan ini tentunya berdampak kepada perempuan terutama perempuan ekonomi menengah ke bawah yang tidak punya akses berkendaraan pribadi dan tergantung pada kendaraan umum. Hal ini bisa dirasakan ketika perempuan dalam keadaan hamil dan melahirkan serta kebutuhan sarana untuk mengantar jemput anak sekolah harus menjadi perhatian.

J. Pencari Kerja dan Lowongan Tenaga Kerja Berdasarkan Gender Tahun 2016

Sebagai salah satu daerah penyokong Ibu Kota Jakarta, Kabupaten Bekasi dikenal luas sebagai kawasan industri. Bahkan menjadi kawasan industri terbesar se Asia Tenggara. Dengan banyaknya perusahaan nasional, internasional maupun multinasional yang membuka pabrik mereka di daerah Kabupaten Bekasi memberikan peluang kesempatan kerja yang terbuka lebar bagi masyarakat Bekasi.

Lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Bekasi di kelompokkan menjadi 5 sektor unggulan yaitu:

1. Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
2. Bidang Pengolahan
3. Bidang Perdagangan, Hotel dan Restoran

4. Jasa-jasa
5. Lainnya

Adapun untuk lebih detail terkait dengan jumlah lowongan tenaga kerja dan pencari kerja dapat dilihat berdasarkan table di bawah ini.

Tabel 4.26
Jumlah Lowongan tenaga Kerja Dan Pencari Kerja
Berdasarkan Gender Tahun 2017.

No	Kategori	2014		2015		2016	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	perempuan	Laki-laki	perempuan
1.	Pencari Kerja	18.925	12.794	16.729	13.699	8.193	13.715
2.	Lowongan Kerja	11.901	8.710	10.629	2.752	7.456	9.738

Sumber : BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2017

Berdasarkan table di atas terlihat gambaran yang jelas bahwa jumlah pencari kerja antara laki-laki dan perempuan berdasarkan data perbandingan tahun 2015 dan 2016 (data tahun 2017 belum tersedia) tidak berbeda secara signifikan. Namun gambaran yang jauh berbeda terjadi pada jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Gap yang besar antara lowongan yang tersedia untuk laki-laki dan perempuan memberikan kontribusi pada rendahnya angka angkatan kerja kaum perempuan yang disebabkan oleh ketimpangan yang lebar antara jumlah pencari kerja perempuan dengan lowongan pekerjaan yang tersedia.

Sebagaimana data yang terjadi tahun 2016 misalnya, jumlah lowongan yang tersedia hanya 46% yaitu 9.738 lowongan pekerjaan dari total jumlah pencari kerja wanita terdaftar pada Dinas tenaga Kerja sebanyak 13.715. Gap ini bisa semakin besar mengingat data yang dirilis oleh BPS merupakan

data pencari kerja yang terdaftar. Jumlah pekerja wanita yang tidak terdaftar bisa jauh lebih besar mengingat besarnya jumlah angka wanita produktif yang ada di Kabupaten Bekasi.

K. Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja

Salah satu elemen penting yang juga harus diperhatikan dalam konteks pengarusutamaan gender dalam konteks ketenagakerjaan adalah angka angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja dimaknai sebagai akumulasi jumlah kelompok masyarakat usia produktif baik itu yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari kerja.

Adapun komponen bukan angkatan kerja yaitu kelompok masyarakat usia produktif yang tidak bekerja karena beberapa alasan utama diantaranya: (1) Sekolah, (2) Mengurus rumah tangga, (3) faktor kesehatan, dan (4) lainnya. Adapun untuk lebih detail terkait jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 4.27
Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja
Berdasarkan Gender tahun 2016.

No	Kategori	2015		2016	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	Angkatan Kerja	734.210	732.360	758.374	631.584
2.	Bukan Angkatan Kerja	452.036	335.225	417.921	389.073

Sumber : BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas memberikan gambaran holistik yang sejalan dengan jumlah pencari kerja dimana jumlah angkatan kerja antara Laki-laki dan Perempuan tidak berbeda jauh. Hal ini juga sejalan dengan perbandingan jumlah penduduk Kabupaten Bekasi dimana perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan tidak terlampau jauh selisihnya.

Namun yang perlu untuk diperhatikan dan segera dicari solusinya pemecahannya yaitu tingginya angka bukan angkatan kerja di Kabupaten Bekasi. Karena kelompok bukan angkatan kerja yang cukup besar ini semakin lama akan semakin rentan dengan potensi terjadinya pengangguran. Hal ini sejalan dengan selisih antara lowongan kerja yang tersedia setiap tahunnya yang masih jauh di bawah jumlah pencari kerja. Potensi Kabupaten Bekasi sebagai salah satu kawasan industri terbesar bukan hanya di Indonesia tetapi se- Asia Tenggara hendaknya mampu dijadikan peluang untuk meningkatkan jumlah lowongan pekerja terutama untuk masyarakat Bekasi itu sendiri.

L. Pegawai Yudikatif (Hakim/Jaksa) dan Aparat Kepolisian serta TNI dalam Perspektif Gender di Kab. Bekasi 2017

Instansi yudikatif (kehakiman dan kejaksaan) dan aparat kepolisian sering kali dianggap sebagai jenis pekerjaan yang berdasarkan gender lebih diasumsikan sebagai pekerjaan yang lebih tepat dan sesuai untuk kelompok maskulin atau untuk kaum laki-laki. Konsep pengarusutamaan gender yang begitu mendapat dukungan secara aktif oleh pemerintah pusat dan daerah memberikan warna yang lebih membuka ruang bagi kaum perempuan (kaum feminist) untuk bekerja pada bidang-bidang tersebut.

Kesetaraan gender dan keadilan gender memberikan peluang yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk bekerja pada bidang yudikatif (penegakan hukum). Untuk lebih detail terkait dengan jumlah pegawai yudikatif (hakim dan jaksa) dan aparat kepolisian serta TNI dalam perspektif gender di Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 4.28
Pegawai Yudikatif (Hakim/Jaksa) dan Aparat Kepolisian
Serta TNI Berdasarkan Gender tahun 2017.

No	Kategori	2016		2017	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	perempuan
1.	Hakim & Jaksa	75	31	78	36
2.	Kepolisian	325	57	330	69
3.	TNI	246	43	246	48

Sumber : Data Sekunder yang diolah tahun 2017

Daya yang dikumpulkan merupakan data kompilasi yang dikumpulkan melalui proses dokumentasi dan survey lapangan atas pegawai yang berprofesi sebagai Hakim & Jaksa, Polisi dan PNS Kepolisian dan TNI serta PNS TNI.

Dimana dominasi laki-laki dan perempuan pada bidang yudikatif, kepolisian dan TNI merupakan hal yang terjadi hamper di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Bekasi. Dalam konteks psikologi masyarakat secara umum dapat menerima fenomena tersebut karena menganggap pekerjaan tersebut lebih sesuai untuk diemban kaum laki-laki.

Reformasi di tubuh TNI dan POLRI serta lembaga yudikatif serta dukungan penuh dari semua pihak atas kesetaraan gender perlahan namun pasti juga menyentuh bidang yudikatif, Kepolisian dan TNI. Fenomena ini perlu untuk terus dijaga keberlangsungannya. Data yang ada di atas memberikan gambaran bahwa eksistensi kaum perempuan tidak terbatas pada konteks gender untuk pekerjaan tertentu saja.

Selain dari bidang yudikatif, Kepolisian dan TNI, bidang pekerjaan lain yang diangkat dalam Buku Statistik Gender dan Analisis Gender Tahun 2017 ini juga menggali informasi yang lebih luas. Pada bagian ini kami juga menyajikan data terkait dengan jumlah pengusaha dan menejer di perusahaan swasta serta pegawai BUMD berdasarkan gender di Kabupaten Bekasi tahun 2017.

M. Pengusaha & Pegawai di Perusahaan Swasta (Menejer) Serta Pegawai BUMD Berdasarkan gender di Kab. Bekasi 2017

Jenis pekerjaan sebagai pengusaha dan menejer maupun lever kepemimpinan lainnya sering kali diidentikan kepemimpinan dengan laki-laki. Terutama pada beberapa komunitas, suku, adat istiadat masyarakat tertentu masih sangat sensitif dengan konsep kepemimpinan perempuan. Dalam banyak referensi psikologi maupun konsep kepemimpinan tidak ada konsep yang membatasi bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin.

Bahkan sejarah mencatat banyak pemimpin perempuan yang berhasil dalam menjalankan organisasi/instansi yang mereka pimpin. Hal tersebut secara tidak langsung mengikis pemahaman dan stigma masyarakat bahwa kepemimpinan itu merupakan kodrat laki-laki.

Untuk lebih detail terkait dengan jumlah pengusaha, menejer perusahaan swasta serta pegawai BUMD dalam perspektif gender di Kab.Bekasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.29
Jumlah Pengusaha, Menejer Perusahaan Swasta Dan Pegawai BUMD Dalam Perspektif Gender di Kab. Bekasi Tahun 2016

No	Kategori	2015		2016	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	Jumlah Pengusaha	4.538	546	4.560	573
2.	Menejer Perusahaan Swasta	11.239	4.025	11.434	4.297
3.	Jumlah Pegawai BUMD	113	72	135	81

Sumber: Apindo dan data sekunder diolah Tahun 2017

Kabupaten Bekasi sebagai daerah industri terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara memiliki sejumlah kawasan industri dengan skala terbesar. Pengusaha yang memiliki

investasi di Kabupaten Bekasi berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Indonesia didominasi ekspatrian dan pengusaha internasional serta multinasional.

Kawasan industri seperti Lippo, Jababeka, kawasan MM2100, EJIPP dan lain sebagainya merupakan sederetan kawasan industri yang menjadi pusat industri di Kabupaten Bekasi. Dengan banyaknya kawasan industri tersebut dengan sendirinya menggambarkan banyak jumlah pengusaha yang ada di Kabupaten Bekasi.

Data jumlah pengusaha di atas bisa saja bertambah karena banyaknya pengusaha lokal dan UMKM yang belum terdaftar dan terdeteksi oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia, Kadin merupakan instansi terkait lainnya. Dengan jumlah pengusaha yang begitu banyak ternyata menampilkan gambaran ketimpangan gender. Dimana jumlah pengusaha perempuan masih sangat kecil dibandingkan dengan pengusaha laki-laki.

Berdasarkan tabel di atas, presentase pengusaha perempuan masih di bawah kisaran 10 % jika dibandingkan dengan pengusaha laki-laki di tahun 2015. Di tahun 2016 terjadi sedikit peningkatan dalam jumlah pengusaha perempuan menjadi 10,5 %. Hal yang sama juga terjadi pada level menejer.

Jabatan menejer dalam perusahaan berdasarkan data tersebut menunjukkan dominasi laki-laki atas menejer perempuan dalam segi kuantitas. Data tahun 2015 dan 2016 menunjukkan bahwa menejer perempuan perusahaan swasta masih di bawah 30 %. Namun belum ada data terpilih yang detail mengenai posisi menejer mana saja yang dominan dipercayakan kepada perempuan apakah di menejer keuangan, HRD dan lain sebagainya

N. Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Trafficking Berdasarkan Gender di Kab. Bekasi 2017

Variabel baru yang diangkat dan dibahas dalam Buku Statistik dan Analisis Gender Kabupaten Bekasi tahun 2017 ini adalah variabel kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Variabel kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diulas dalam buku edisi ketujuh ini tidak disinggung pada edisi sebelumnya. Dengan mempertimbangkan bahwa biar gender, ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender berpotensi memunculkan konflik dan permasalahan sosial lainnya. Dominasi kaum laki-laki terhadap perempuan terjadi banyak cakupan kehidupan mulai dari dominasi dalam rumah tangga, lingkungan, pekerjaan dan lainnya.

Dominasi yang cenderung absolut dari salah satu gender dapat memicu terjadinya diskriminasi, subordinasi hingga marginalisasi dan pada titik puncaknya terjadi kekerasan (*Violence*) terhadap perempuan dan anak. Anak tidak lepas dari potensi korban pelaku kekerasan. Dalam konteks korban kekerasan, perempuan dan anak tergolong sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan.

Anak potensial dan rentan menjadi korban kekerasan karena anak tidak dan atau blum memiliki kemampuan optimal selayaknya orang dewasa untuk melindungi diri mereka dari pelaku kekerasan. Secara kodrati anak (berdasarkan Undang-Undang no 23 tahun 2002) adalah individu yang masih berada dibawah umur 18 tahun termasuk anak dalam kandungan adalah kelompok masyarakat yang lemah sehinggasesering kali menjadi objek kekerasan dengan berbagai alasannya.

Tabel di bawah ini memberikan gambaran mengenai jumlah perempuan korban kekerasan dan kejahatan umum dan jumlah perempuan dan anak korban trafficking berdasarkan data yang dikumpulkan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari Polres Metro Kab. Bekasi, Komnas Perempuan, KPAI, dan Komnas Perlindungan Anak. Gabungan sumber tersebut dilakukan mengingat tidak semua kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dilaporkan ke pihak kepolisian.

Tabel 4.30
Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam
Perspektif Gender di Kab. Bekasi Tahun 2016

No	Kategori	2013	2014	2015	2016
1.	Perempuan Korban Kekerasan Dan Kejahatan Umum	48	36	62	50
2.	Anak Korban Kejahatan Dan Kekerasan Umum	37	20	30	43
3.	Perempuan Dan Anak Korban Traffcking	5	8	4	10

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Dalam proses pengumpulan informasi terkait dengan jumlah korban kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dilakukan oleh tim peneliti dengan melakukan sejumlah kunjungan , studi dokumentasi serta wawancara dengan pihak yang berkompeten disepakati bahwa berdasarkan Undang-Undang bahwa identitas pelopor dan korban harus dijaga dan tidak boleh dipublikasikan secara detail dan meluas.

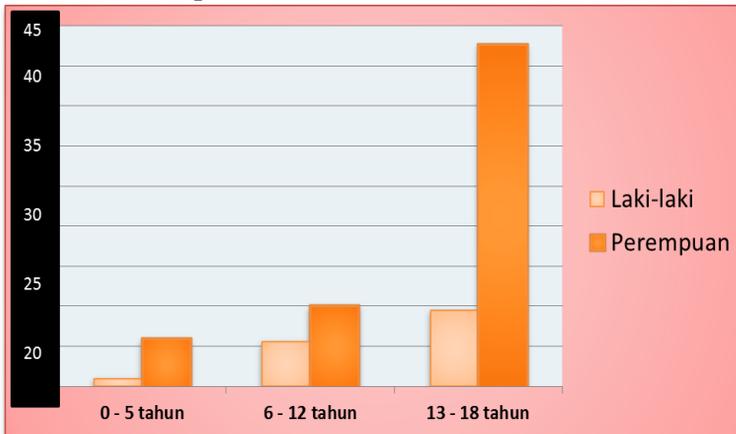
Karena alasan tersebut, tim peneliti memutuskan memberikan gambaran yang bersifat umum tanpa menyebutkan identitas maupun asal daerah korban kekerasan terhadap anak dan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Namun satu yang pasti bahwa berdasarkan hasil pengumpulan informasi yang dilakukan oleh tim peneliti bahwa fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak layaknya fenomena bola salju. Data yang dipaparkan di atas belum bisa secara pasti menggambarkan jumlah sebenarnya dari angka yang sebenarnya terjadi. Karena sangat sedikit korban kekerasan terhadap anak dan perempuan membuat laporan ke pihak yang berwenang.

Fenomena bola salju yang dimaksud adalah kasus kekerasan pada anak dan perempuan nampaknya atau terlihat biasa-biasa saja dan terkesan tidak mengkhawatirkan. Namun sejalan berjalannya waktu ia menjadi bom waktu yang begitu meledak, kasus-kasus yang terpendam kemudian bermunculan satu persatu kepermukaan.

Berdasarkan laporan yang tim peneliti dapatkan dari Polres Kabupaten Bekasi menyebutkan bahwa laporan kekerasan terhadap anak dan perempuan didominasi oleh kekerasan fisik dan seksual. Pada tabel berikut disajikan data usia korban kekerasan seksual pada anak berdasarkan kelompok umur tahun 2017.

Gambar 4.5
Usia Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan kelompok Umur di Kab. Bekasi Tahun 2017.



Berdasarkan bagan di atas, diketahui bahwa dalam konteks korban kekerasan seksual terhadap anak lebih banyak terjadi pada perempuan. Dengan usia korban kekerasan pada rentang umur 13 - 18 tahun menjadi usia dominan yang menjadi korban kekerasan seksual.

Jika dipandang dari sudut pandang psikologi perkembangan, pada kelompok umur inilah anak dimulai mencapai masa pubertas dengan munculnya tanda-tanda anak

perempuan sekunder yang dicirikan dengan perubahan fisik yang dialami anak perempuan menjadi remaja perempuan.

Kurangnya edukasi mengenai sex education secara tepat berdasarkan tumbuh kembang anak dan sifat lemah anak menjadikan mereka rentan atas kekerasan seksual. Fenomena ini dipicu juga oleh banyak faktor. Salah satu yang justru dipicu oleh pola tingkah laku anak perempuan yang menjadikan objek dari kekerasan seksual diantaranya: menggunakan pakaian yang ketat dan transparan, rok mini dan beberapa hal sepele lain yang justru bisa menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual pada anak.

Namun data juga menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada remaja perempuan. Menyedihkannya, anak/balita laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari kekerasan seksual oleh keluarga dekat, tetangga dan lainnya. Pada tahun 2017 berdasarkan data yang dihimpun dari sejumlah data sekunder memunculkan angka kumulatif 21 anak korban kekerasan yang masih tergolong balita. Sebuah fenomena yang miris dan harus dilihat secara komprehensif dan harus segera dicegah agar tidak terjadi di masa yang akan datang.

Dalam konteks terjadinya kekerasan terhadap anak dibawah ini umur atau yang lebih dikenali lua dalam dunia psikologi dan kepolisian dengan sebutan pedofilia. Tindakan ini sebenarnya merupakan bentuk kelainan bahkan dapat dikategorikan sebagai penyakit seksual yang menyebabkan orang dewasa tertarik dan tergerak nalurinya untuk melakukan aktifitas seksual dengan anak dibawah umur.

Pada tabel berikut kami memberikan gambaran sejumlah kasus korban pedofilia di Kabupaten Bekasi tahun 2017.

Tabel 4.31 Jumlah Kasus Pedofilia Dan Jumlah Korban Pedofilia di Kabupaten Bekasi Tahun 2017

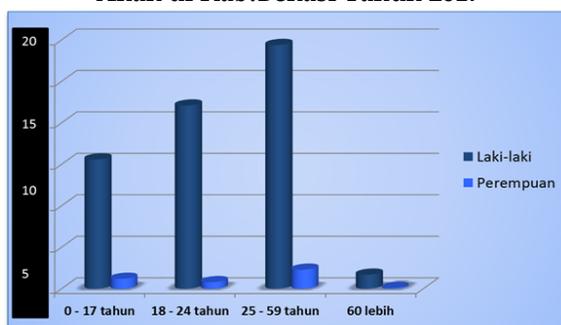
No	Kategori	2015		2016		2017	
		Laki laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	Jumlah Kasus	10		13		14	
2.	Jumlah Korban	6	22	7	26	9	27

Sumber: data sekunder diolah tahun 2017

Kasus kekerasan seksual yang mendominasi kekerasan yang terjadi terhadap anak di tahun 2016 juga diwarnai dengan kasus pedofilia. Jumlahnya pun ternyata cukup mengagetkan. Data dari Komnas Perlindungan Anak mengatakan bahwa bukan daerah metropolitan saja yang dalam realitasnya kita menemukan kasus pedofilia. Di daerah pelosok, pedalaman termasuk didaerah industri seperti Bekasi juga menjadi lokus dari pelaku pedofilia.

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pelaku pedofilia umumnya melakukan tindakan kekerasan secara seksual tidak hanya pada satu korban. Dalam pendekatan psikologis, hasrat tersebut selalu ingin untuk dipenuhi oleh pelaku. Karena hal tersebut merupakan bentuk penyakit dan penyimpangan dalam perilakunya. Pelaku pedofilia merupakan predato anak yang sangat berbahaya karena pelaku pedofilia tidak tergantung pada kelompok umur.

Gambar 4.6 Bagan Usia Pelaku Kekerasan Terhadap Anak di Kab.Bekasi Tahun 2017

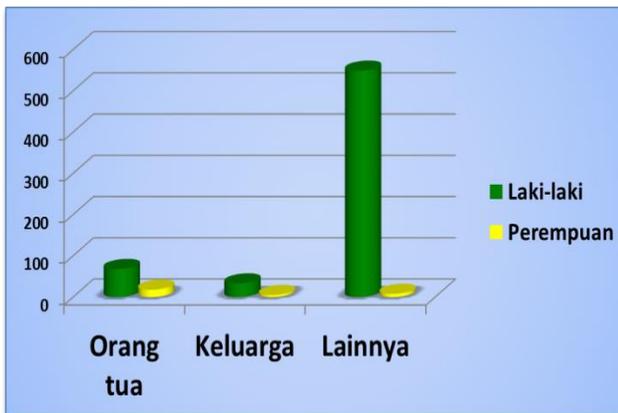


Berdasarkan bagan diatas diketahui bahwa pelaku kekerasan terhadap anak di dominasi oleh laki-laki. Namun bukan berarti bahwa tidak ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh perempuan baik itu oleh ibu kandung, ibu tiri, pembantu, baby sister, tetangga dilingkungan sekitar rumah, oknum guru dan sebagainya.

Dari segi kelompok umur pelaku kekerasan terhadap anak dapat dilakukan oleh kelompok anak itu sendiri. Namun pelaku kekerasan pada anak di dominasi oleh remaja dan orang dewasa. Superioritas yang dianggap dimiliki menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak yang lebih inferior. Perlindungan oleh keluarga dan terlebih masyarakat harus segera digalakan.

Sifat apatis terhadap apa yang terjadi di sekitar kita menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak kekerasan terhadap anak yang notabene mestinya dilindungi dan mendapat kasih sayang. Dominasi pelaku kekerasan terhadap anak yaitu usia produktif anak 25 – 59 tahun.

Ada banyak faktor mengapa usia produktif dalam relitas kasus kekerasan terhadap anak menjadi pelaku. Tekanan pekerjaan, beban kerja, konflik dengan pasangan, diskriminasi dan marginalisasi sosial, faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kekerasan terhadap anak. adapun hubungan antara pelaku dan korban anak dibahas pada bagian berikut ini.



Berdasarkan grafik di atas, kejadian tindak kekerasan terhadap di kabupaten Bekasi di tahun 2017 jika dilihat dari hubungan antara pelaku dan korban didominasi oleh bukan orang tua kepada anaknya, bukan pula oleh kerabat dekat, melainkan dilakukan oleh pelaku yang notabene bukan bagian dari keluarga ini. Meskipun tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dan kerabat juga masih kerap terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, kewaspadaan dini perlu dilakukan oleh semua pihak secara komprehensif dalam mengawasi anak-anak kita dari tindak kekerasan yang mengancam mereka. Termasuk pentingnya kita mengawasi pergaulan anak-anak kita, karena cukup banyak kekerasan justru dilakukan teman sebayanya. Tabel berikut akan memberikan gambaran mengenai jumlah anak pelaku tindak pidana dan anak berhadapan dengan hukum.

Tabel 4.33
Jumlah Anak Pelaku Tindak Pidana Dana Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Gender di Kab. Bekasi Tahun 2017

No	Kategori	2015		2016	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	Jumlah Anak Pelaku Tindak Pidana	65	9	71	12
2.	Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum	35	1	48	0

Sumber : Pengadilan Negeri Bekasi

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2014", Penerbit Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, CV Permata Andhika: Jakarta 2014.
- Mansour, fakih.1999.Analisis Gender dan Transformasi Sosial.Pustaka pelajar.
- Mansour, Fakih, *Bias Gender Dalam Pembangunan*,Penerbit Pustaka Pelajar, 2006
- Fakih, M. (2006). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2005-2012, Kerjasama BPS dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Rianti, Nugroho. 2008. Gender dan Strategi Pengarusutamaanya di Indonesia. Pustaka pelajar: Yogyakarta.
- Santrock, J. W. (2002). *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup*. Jakarta: Erlangga.
- Schneiders, A. (1964). *Personal Adjustment and Mental Health*. New York: Rinehart & Winston
- Tim penyusun kementerian pemberdayaan perempuan. 2004. *Pastikan Partai Anda Jadi pilihan*. Kemeterian pemberdayaan perempuan: Jakarta.
- Subakti, A. Ramlan dkk. 2011 *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Prenada Media Group
- Tim penulis, *Statistik dan Analisis Gender Kabupaten Bekasi Tahun 2014, 2015, 2016*.

B. Dokumen

- BPS Kabupaten Bekasi 2014/2015
- BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2014
- Data dari Dinas perindustrian perdagangan koperasi dan UMKM Kab. Bekasi Tahun 2013.

Data dari United Nation Acquired Immunodeficiency Syndrome yang di muat dalam Tempo Edisi 7-13 Desember 2015.

Laporan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia 2007, BPPN Kementerian Negara perencanaan pembangunan nasional.

Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2014

Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2005-2012. Kerjasama BPS dengan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kumpulan data disetiap kecamatan di Kabupaten Bekasi
Selayang pandang Kabupaten Bekasi 2010

C. Internet

Jurnal perempuan Mellenium Development Goals dan Gender Mainstreaming.

<http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=4>,

<http://jurnalperempuan.com/2011/05/millenium-development-goals-dan-gender-mainstreaming/>.

www.jabarprov.go.id/.../PENGHITUNGANINDEKSPEMBAN
GUNAN, Genderpedia, <http://genderpedia.blogspot.com/2012/04/statistik.html>, <http://doktersehat.com/pengertian-dan-tujuan-keluarga-berencana-kb/ixzz2g19gebi8>

<http://www.gobekasi.com/index.php/detail/5346/dak-pondidikan-capai-rp114miliar#.Uklb9sfH50s>

www.bekasikab.go.id

<http://bekasikab.go.id/berita-penderita-aids-di-kabupaten-bekasi-capai-700-orang.html>,

www.jabarprov.go.id/.../PENGHITUNGANINDEKSPEMBAN
GUNANANM..., <http://www.bappenas.go.id>

<http://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/menteri-andrinof-indeks-pembangunan-gender-ippg-terus-meningkat/>

KESETARAAN GENDER

DAN STRATEGI PENGARUSUTAMAANNYA



Suharjuddin, S.Pd, M.Pd tidak hanya praktisi di bidang pendidikan, perlindungan anak dan perempuan serta analis pembangunan berbasis masyarakat, namun juga seorang akademisi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, lahir di Kota Kendari, 8 Juli 1987. Merupakan anak sulung dari empat bersaudara. Lahir dan dibesarkan dari keluarga pendidik yang sejak kecil ditanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran dan kerja keras. Ayah, Prof. Dr. Hasanuddin Bua, SE, M.Si dan Ibu, Suraidah, SE, MM.

Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Halu Oleo Kendari, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2009 dengan predikat *Cum Laude* dan menjadi wisudawan terbaik 1 Universitas Halu Oleo Kendari. Melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Manajemen Pendidikan dan menyelesaikan studinya tahun 2013 dengan predikat *Cum Laude*. Tercatat sebagai mahasiswa doktoral (S3) Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.

Memilih berhijrah dan merantau meninggalkan kampung halaman menuju Ibu Kota Jakarta. Pada periode 2007 – 2009 menjadi peneliti pendamping untuk social science project di Operation Wallacea-Indonesia. Tahun 2010 – 2013 menjadi tenaga pengajar di Bimbingan Belajar Ganesha Operation. Menjabat sebagai Staf Ahli DPRD Kab. Bekasi tahun 2016 – 2017. Menjadi dosen tetap Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada tahun 2017. Dan pada tahun 2018 sampai sekarang dipercaya sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain berkarir sebagai akademisi, juga dipercaya sebagai komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bekasi priode 2017 – 2020 (Komisioner Bidang Pendidikan) dan dipercaya kembali menjabat sebagai Wakil Ketua KPAD Kab. Bekasi periode 2020 – 2025.